



Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Kampung  
Kabupaten Way Kanan

# **RENSTRA**

## **Rencana Strategis**

### **Tahun 2021-2026**

Jalan Camat Mas Enggung No.12  
Komplek Perkantoran PEMDA  
Blambangan Umpu  
2021



# **RENSTRA**

**(REVIU)**

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
BLAMBANGAN UMPU  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Renstra ini disusun untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap bidang pelaksana untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban.

Manfaat yang bisa didapat dari adanya dokumen rencana strategis ini adalah dapat membantu pengelolaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, menghasilkan rencana dan pembangunan yang lebih terarah, dapat memecahkan isu-isu strategis dan mendorong terwujudnya komitmen, kesepakatan dan kerjasama antara instansi masing-masing dengan masyarakat, menyediakan pelayanan lebih baik berdasarkan data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyampaian pelayanan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, terbuka dan transparan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan "*Way Kanan Unggul dan Sejahtera*".

Blambangan Umpu, 9 Mei 2022

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG  
KABUPATEN WAY KANAN,



**IXUANAHMADI, S.Sos., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197511011995031001

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>15</b>
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	15
2.2. Sumber Daya Dinas PMK .....	35
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	35
2.2.2. Gedung .....	37
2.2.3. Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor .....	37
2.2.4. Sarana Transportasi .....	39
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	39
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMK .....	90
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ....</b>	<b>91</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan .....	91
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	94
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PDT dan Renstra Dinas PMD Provinsi Lampung .....	101
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PDT .....	101
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas PMD Provinsi Lampung .....	103

3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	106
3.4.1.	Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah .....	106
3.4.2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	106
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	107
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN .....	109
4.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung .....	109
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	112
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	118
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	138
BAB VIII	PENUTUP .....	141

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	35
Tabel 2.2. Jumlah Aset/Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan .....	37
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	41
Tabel 2.4. Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM .....	44
Tabel 2.5. Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun(IDM) Kabupaten Way Kanan Periode 2016-2021 .....	44
Tabel 2.6. Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2018 .....	44
Tabel 2.7. Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2019 .....	52
Tabel 2.8. Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2020 .....	59
Tabel 2.9. Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2021 .....	68
Tabel 2.10. Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2022 .....	76
Tabel 2.11. Status Kecamatan Berdasarkan Rata-Rata IDM Tahun 2018 .....	83
Tabel 2.12. Status Kecamatan Berdasarkan Rata-Rata IDM Tahun 2019 .....	84
Tabel 2.13. Status Kecamatan Berdasarkan Rata-Rata IDM Tahun 2020 .....	85
Tabel 2.14. Status Kecamatan Berdasarkan Rata-Rata IDM Tahun 2021 .....	85
Tabel 2.15. Status Kecamatan Berdasarkan Rata-Rata IDM Tahun 2022 .....	86
Tabel 2.16. Status Kabupaten Berdasarkan Indeks Desa Membanguna (IDM) .....	87
Tabel 2.17. Jumlah Lembaga Organisasi Masyarakat Kampung Tahun 2021.....	87
Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 .....	89
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	92
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PMK .....	98
Tabel 3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	99
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMK .....	110
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan tahun 2021- 2026 .....	114

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan .....	122
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas PMK yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	139

Lampiran-lampiran :

1. RPJMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.
2. Tabel T.C. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
3. Tabel T.C. 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.
4. Tabel T.C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.
5. Tabel T.C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.
6. Tabel T.C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMK Periode 2016-2021.
7. Tabel T.C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMK Tahun 2016-2021.
8. Tabel T.C. 35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
9. IKU Dinas PMK Kabupaten Way Kanan.
10. Struktur Dinas PMK Kabupaten Way Kanan.

## **LAMPIRAN**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY  
KANAN TAHUN 2021-2026.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Arah Pembangunan Nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan mental psikologi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan manusia dewasa ini adalah “Pemberdayaan”. Tentunya implementasinya sangat komprehensif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diisyaratkan bahwa baik Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi wajib menyusun Dokumen Perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Sedangkan pada tingkat kelembagaan ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta dalam



penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah, RPJP Daerah maupun RPJM Nasional dan RPJP Nasional.

Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak (*course of action*) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode Tahun 2021-2026, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Dokumen Renstra ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

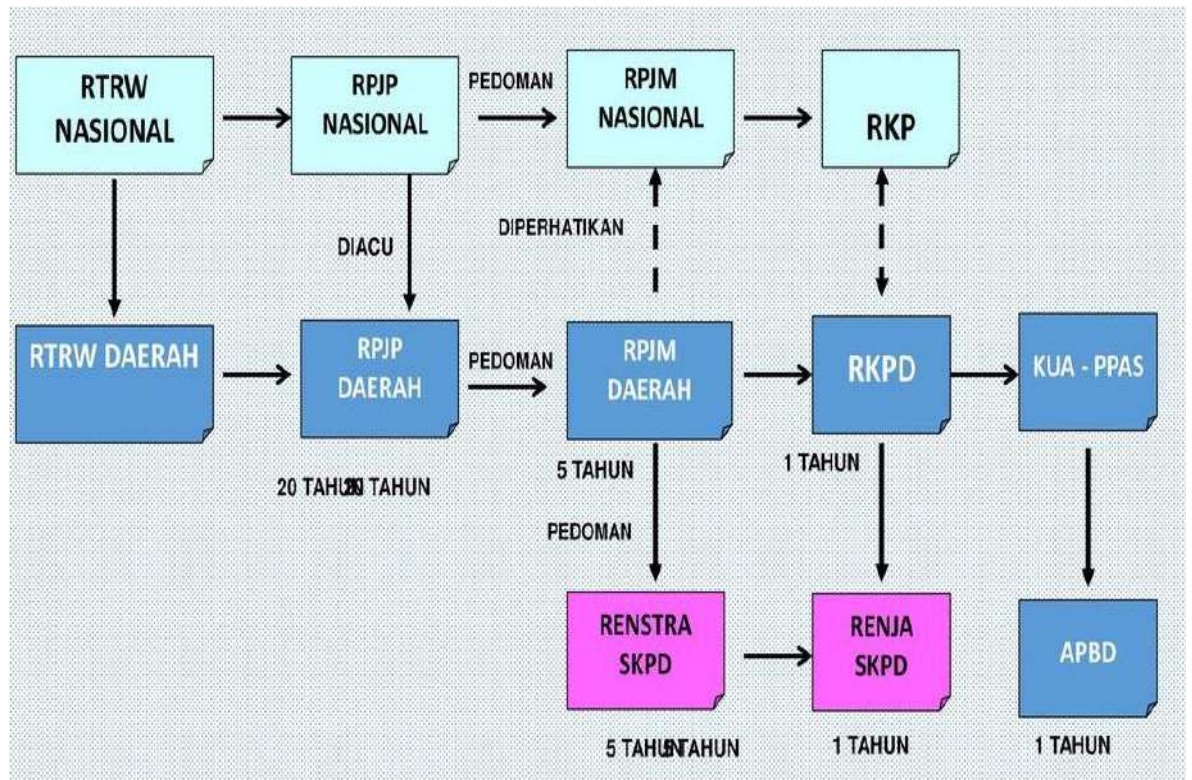
Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat. Disamping itu, urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung ini adalah merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung sesuai dengan amanat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Berpartisipasi untuk memperbaiki diri sendiri mulai dari aspek kualitas SDM, ekonomi maupun lingkungan. Dengan berpartisipasi terhadap aspek tersebut, maka akan tumbuh kemandirian masyarakat dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Beberapa capaian telah dihasilkan dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, diantaranya penyelenggaraan Posyandu yang turut mendukung dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan mendukung kesuksesan pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Way Kanan dan Pembinaan kelompok PKK yang aktif sampai dengan tingkat RT.

Berkaitan dengan pemerintahan desa, permasalahan masih ditemui berkaitan dengan tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah, sehingga menghambat kemajuan pembangunan. Ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum terwujud.

Urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa hanya dapat terlaksana dengan baik jika dimulai dengan sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Hubungan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1

Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Rencana Strategis Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024;
  15. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ/2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;
  18. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah untuk:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;
- b. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kerja tahunan;
- c. Memberikan gambaran pelayanan Dinas PMK terkait dengan kelemahan, kekuatan, tantangan, dan peluang OPD dalam pengembangan pelayanan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas instansi/OPD, serta dapat menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat Latar Belakang yang berisikan pengertian dan fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja. Selain itu juga memuat Landasan Hukum pembuatan Renstra, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan.

##### **1.1. Latar Belakang**



Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra kabupaten, dan dengan Renja OPD

#### 1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung).

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan)

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas

OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung).

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMK

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.

2.2. Sumber Daya Dinas PMK

Memuat uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMK

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMK

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMK

Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

#### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian PDT dan Renstra Dinas PMD Provinsi Lampung

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Menjelaskan dan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah;
5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat daerah

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung). Tujuan Perangkat daerah diturunkan/mengambil dari Sasaran Rancangan RPJMD, Perangkat Daerah melaksanakan sasaran yang sesuai bidang urusan yang dilaksanakan.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) pada Tahun 2021 dan lima tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGAARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB. II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PMK**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan. Sementara itu Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja diatur melalui Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung;
4. Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung;
5. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung.

#### A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode

- kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### B. Kesekretariatan

Kesekretariatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi:

1. penetapan Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas;



4. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
5. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
6. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan;
8. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
9. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas;
10. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas;
11. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
12. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
13. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat, membawahi 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing sub bagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan pertanggungjawaban pada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
2. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
4. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan Dinas;
5. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
6. menyusun dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
7. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
8. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
9. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
10. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
11. melaksanakan dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di Lingkungan Dinas;
12. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan di Lingkungan Dinas;

13. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas;
14. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
15. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
16. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
17. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
18. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
19. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
20. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
21. mengoordinasikan penyusunan administrasi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
23. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas serta pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. Penjabaran tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
2. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja dinas;
3. pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
4. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
5. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dinas;
6. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dinas;
7. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dinas;
8. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
9. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dinas;
10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
11. melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas;
12. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;

13. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
14. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
15. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
16. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
17. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
18. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
19. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang di lingkungan dinas;
20. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
21. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas dinas;
22. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
23. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;  
dan
24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### C. Bidang Pembinaan Pemerintahan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung

Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Aparatur Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemerintahan dan pengembangan kapasitas aparatur kampung. Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan

- kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Aparatur Kampung membawahi 1) Seksi Pembinaan Pemerintahan Kampung, 2) Seksi Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Penyusunan Produk Hukum Kampung, dan 3) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pembinaan Pemerintahan Kampung mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Pemerintahan Kampung. Tugas Seksi Pembinaan Pemerintahan Kampung adalah sebagai berikut:

1. menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pemerintahan kampung;
2. menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi perkembangan kampung;
3. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemilihan kepala kampung, perangkat kampung dan administrasi kampung;
4. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemilihan kepala kampung, perangkat kampung dan administrasi pemerintahan kampung;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala kampung dan perangkat kampung;
6. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan kampung;

7. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pemerintahan kampung;
8. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemilihan kepala kampung dan perangkat kampung;
9. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang layanan pembinaan kampung;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemilihan kepala kampung, perangkat kampung dan layanan pembinaan kampung;
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemilihan kepala kampung, perangkat kampung serta layanan pembinaan kampung; dan
12. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Penyusunan Produk Hukum Kampung mempunyai tugas melaksanakan perumusan, kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan urusan kewenangan dan penyusunan produk hukum kampung, Penjabaran tugas Seksi Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Penyusunan Produk Hukum Kampung adalah sebagai berikut:

1. menyusun pedoman kegiatan di bidang penataan urusan kewenangan kampung dan penyusunan produk hukum kampung;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan urusan kewenangan kampung dan penyusunan produk hukum kampung;
3. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis penataan urusan kewenangan kampung;



4. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum kampung;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan kewenangan kampung;
6. melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hukum kampung;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan urusan kewenangan kampung dan penyusunan produk hukum kampung;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang penataan urusan kewenangan kampung dan penyusunan produk hukum kampung;
9. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan urusan kewenangan kampung dan penyusunan produk hukum kampung;
10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur kampung. Penjabaran tugas Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung adalah sebagai berikut:

1. menyusun database aparatur kampung;
2. menyusun pedoman tata kerja aparatur kampung berdasarkan tugas dan fungsinya;
3. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan kapasitas aparatur kampung;

4. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tata cara dan petunjuk teknis pengembangan kapasitas aparatur kampung;
5. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dalam melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur kampung;
7. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas aparatur kampung;
8. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala kampung hasil pemilihan/penjabat kepala kampung;
9. melakukan pelatihan kepemimpinan serta pembekalan bagi kepala kampung terpilih;
10. melaksanakan pelatihan, pembinaan bagi aparatur pemerintah kampung;
11. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Fasilitasi Keuangan Dan Aset Pemerintahan Kampung

Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan aset pemerintahan kampung. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi keuangan kampung, sumber pendapatan kampung, transfer dana

- kampung, pengelolaan aset kampung dan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi keuangan kampung, sumber pendapatan kampung, transfer dana kampung, pengelolaan aset kampung dan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi keuangan kampung, sumber pendapatan kampung, transfer dana kampung, pengelolaan aset kampung dan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi keuangan kampung, sumber pendapatan kampung, transfer dana kampung, pengelolaan aset kampung dan sistem informasi keuangan dan aset kampung; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan kampung, membawahi 1) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kampung, 2) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung, dan 3) Seksi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung. Masing-masing Seksi pada Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kampung mempunyai tugas melaksanakan perumusan pedoman kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan

penepatan kampung, tugas Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kampung adalah sebagai berikut:

1. menyusun pedoman di bidang fasilitasi perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan kampung, pengembangan potensi sumber pendapatan kampung dan transfer dana kampung;
2. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan kampung bagi aparatur kampung;
3. melaksanakan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
4. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan potensi Pendapatan Asli Kampung (PAK);
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendapatan kampung yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan kampung, pengembangan potensi sumber pendapatan kampung dan transfer dana kampung;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan

norma, standar prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung. Penjabaran tugas Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan pedoman penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung;
2. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan aset kampung;
3. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung;
4. melaksanakan pendataan aset kampung;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengelolaan aset kampung;
6. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung;
8. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung; dan
9. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi keuangan dan aset kampung. Penjabaran tugas Seksi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung adalah sebagai berikut :

1. menyusun pedoman teknis pelaksanaan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
2. melaksanakan pemetaan terhadap potensi dan permasalahan di kampung dalam rangka penerapan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
3. melaksanakan koordinasi dengan *stakholder* dalam rangka penerapan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
4. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis sistem informasi keuangan dan aset kampung;
5. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan sistem informasi keuangan dan aset kampung;  
dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya Dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung

Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat kampung, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. bidang kelembagaan, sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat kampung, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang kelembagaan, sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat kampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Musyawarah Kampung (MUSKAM), Kelembagaan Masyarakat kampung,

- pembinaan kemasyarakatan kampung dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
2. pelaksanaan Kebijakan di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM, kelembagaan masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan PKK;
  3. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM, Kelembagaan Masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan PKK;
  4. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM, Kelembagaan Masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan PKK;
  5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM, Kelembagaan Masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan PKK;
  6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM, Kelembagaan Masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan PKK;
  7. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung, membawahi 1) Seksi Fasilitasi BPK dan MUSKAM, 2) Seksi Fasilitasi PKK dan Bimbingan Masyarakat Kampung, dan 2) Seksi Kelembagaan, Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung dan Teknologi Tepat Guna (TTG). Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Fasilitasi BPK dan MUSKAM mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi serta evaluasi dan

pelaporan di bidang BPK dan MUSKAM. Penjabaran tugas Seksi Fasilitasi BPK dan MUSKAM adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan pendataan anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
2. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemilihan anggota BPK;
3. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan anggota BPK;
4. melaksanakan fasilitasi pelantikan anggota BPK;
5. menyusun pedoman kegiatan BPK dan Musyawarah Kampung;
6. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis bagi anggota BPK;
7. melaksanakan bimbingan teknis bagi anggota BPK;
8. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan MUSKAM;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi PKK dan Bimbingan Masyarakat Kampung, mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang PKK. Penjabaran tugas Fasilitasi PKK dan Bimbingan Masyarakat Kampung adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan pendataan anggota PKK;
2. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan PKK;
3. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan PKK;
4. menyusun pedoman kegiatan PKK;



5. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis/pelatihan bagi kader PKK;
6. melaksanakan bimbingan teknis bagi kader PKK; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kelembagaan, Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung dan TTG, mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat kampung dan TTG. Penjabaran tugas seksi kelembagaan, sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat kampung dan TTG adalah sebagai berikut:

1. menyusun *database* Kelembagaan yang ada di kampung;
2. menyusun pedoman serta memfasilitasi pembentukan lembaga yang ada di kampung;
3. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kelembagaan;
4. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis/pelatihan lembaga masyarakat kampung;
5. melaksanakan bimbingan teknis bagi anggota lembaga masyarakat kampung;
6. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan TTG;
7. melaksanakan pemetaan produk unggulan kampung;
8. menyusun bahan pemberian teknis/pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat;
9. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat; dan
10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.2 Sumber Daya Dinas PMK

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memiliki sarana dan prasarana, yaitu:

### 2.2.1.Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Sumber daya manusia berdasarkan data awal Tahun 2021 jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, jumlah personil Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Daerahnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, berdasar klasifikasi kepangkatan dapat dilihat pada table dan grafik berikut:

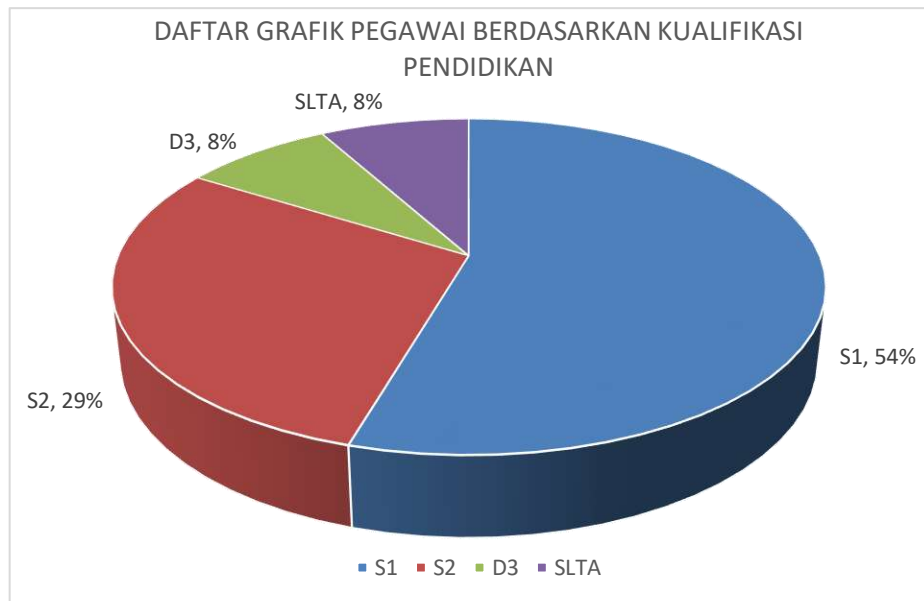
**Tabel 2.1**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Jml	Pangkat/ Gol. Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Jml	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S1	1	
2	Sekretaris	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S1	1	

No	Jabatan	Jml	Pangkat/ Gol. Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Jml	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kabid	3	Pembina (IV/a)	1	S2	2	
			Penata Tk. I (III/d)	2	S1	1	
4	Kasubbag	2	Pembina (IV/a)	1	S2	1	
			Penata (III/c)	1	S1	1	
5	Kasi	9	Pembina (IV/a)	1	S2	5	
			Penata Tk. I (III/d)	3	S1	3	
			Penata (III/c)	5	D3	1	
6	Staf	7	Penata (III/c)	1	S1	4	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	3			
			Pengatur Tk. I (II/d)	1	D3	1	
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	SLTA	2	
			Pengatur Muda (II/a)	1			
7	Honorar	13		1	D3	1	
				11	SLTA	11	
				1	SMP	1	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>36</b>		<b>36</b>		<b>36</b>	

(Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMK Kab. Way Kanan Tahun 2021).



**Grafik 2.1**

Daftar Grafik Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
(Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMK Kab. Way Kanan Tahun 2021).

**2.2.2. Gedung**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menempati Gedung milik Kabupaten Way Kanan yang terletak di Jalan Camat Mas Enggung, Komplek Perkantoran Pemkab Km2 Blambangan Umpu yang terdiri dari bangunan gedung kantor 1 unit, Gudang 1 unit, Aula 1 unit, Papan Nama Kantor 1 unit dan mushola 1 unit.

**2.2.3. Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor**

Sampai dengan saat ini tahun 2021 sarana perlengkapan dan peralatan kantor yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

Jumlah Aset / Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung  
Kabupaten Way Kanan

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Barang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Mesin absensi	1
2	AC	11
3	Kipas angin	2
4	Personal Komputer	2
5	Laptop/note book	13
6	Printer	10
7	Almari Besi	10
8	Almari Kayu	3
9	LCD	2
10	Scaner	1
11	Telephon	1
12	Faximille	1
13	Wireless Amplifier	1
14	Soundsystem	1
15	Tustel	1
16	Handycam	1
17	Televisi	1
18	Lemari Es / Kulkas	2
19	Mesin Penghisap Debu	1
20	Mesin Tik Elektrik	2
21	Kursi Rapat	130
22	Kursi Kerja <sup>1/2</sup> Biro	14
23	Kursi Kerja 1 Biro	6
24	Meja Kursi Tamu/Sofa	3
25	Meja Rapat	6
26	Meja Kerja Pejabat	6
27	Meja Kerja	20
28	Meja Kayu	3
29	Filling Kabinet Besi / Metal	8
30	Rak Kayu	3
31	Tempat / Kranjang Sampah	7
32	Rak Buku Kayu	1
33	Lemari dan Arsip Pejabat	1
34	Dispenser	4
35	Papan Pengumuman	1
36	Papan Tulis / Whiteboard	2
37	Taplak Meja	2
38	Gorden	20
39	Karpet	1
40	Brankas	1
41	Jam Dinding	5

No	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	2	3
42	Calculator	1
43	Kaca Cermin	2

#### **2.2.4.Sarana transportasi**

Untuk menunjang kelancaran operasional, sarana transportasi yang dimiliki adalah 2 unit mobil dan 6 unit sepeda motor.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMK**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Capaian kinerja indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 rata-rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Dalam kurun waktu 5 tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah menyelenggarakan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja capaian-capaian program prioritas dimaksud.

Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan

kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Periode Sebelumnya**

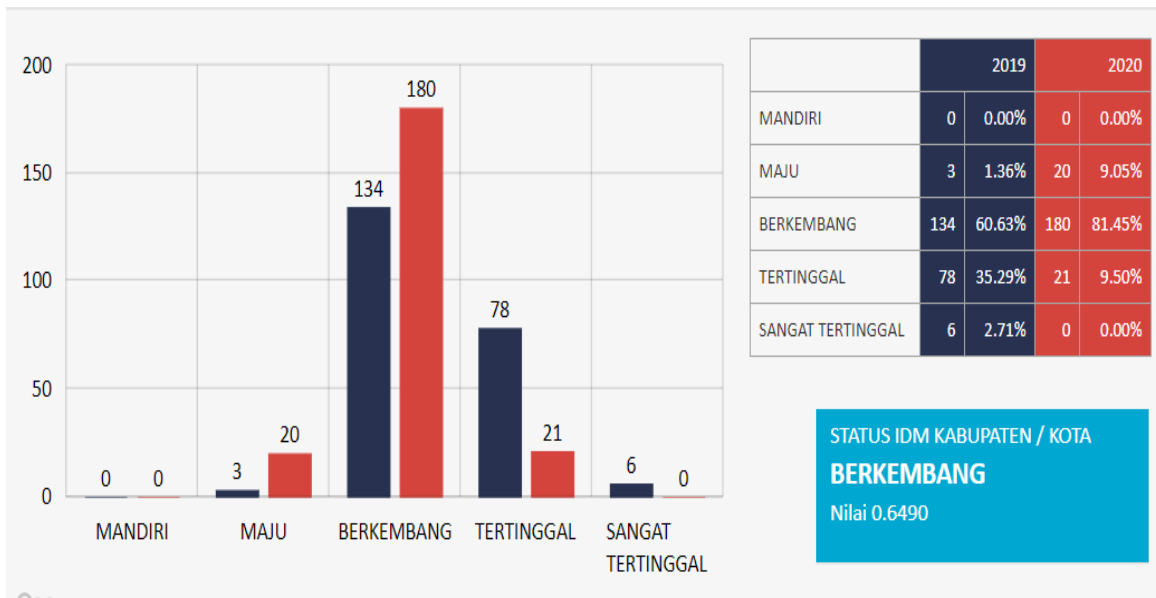
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	55,00	9,05	6,79	4,52	-	-	52,48	38,01	9,50	8,60	-	-	52,48	38,01	9,50	8,60



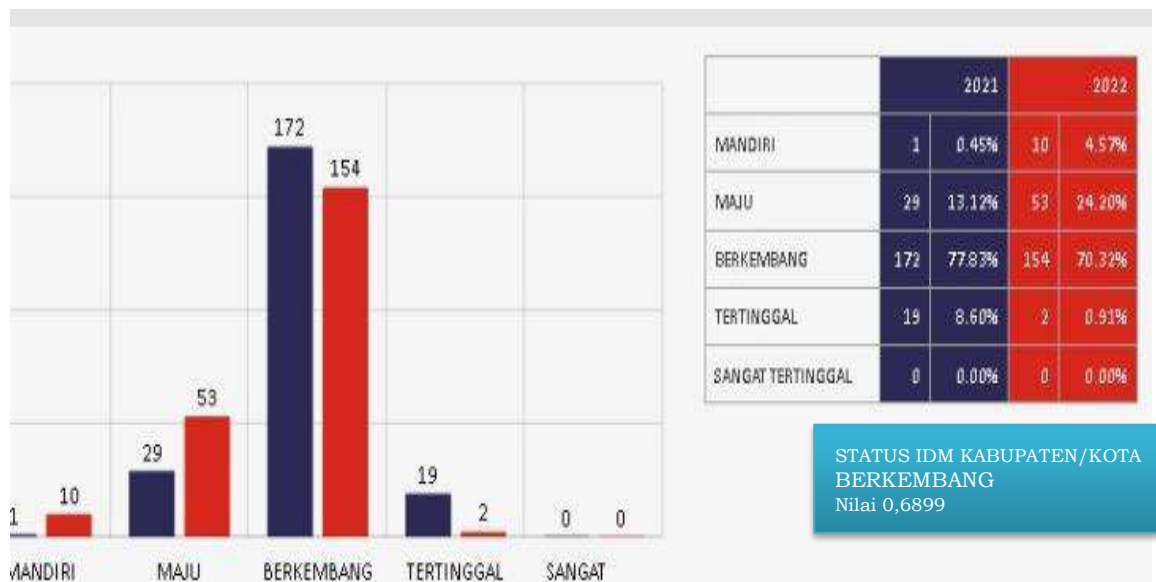
Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun di rilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menetapkan menetapkan status setiap Desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Indeks Desa Membangun Kabupaten Way Kanan dapat di lihat pada infografis berikut:

**Grafik Status IDM Kabupaten/Kota  
Tahun 2019 - 2020**



**Grafik Status IDM Kabupaten/Kota  
Tahun 2021 - 2022**



**Tabel 2.4**  
**Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM**

No.	STATUS DESA	NILAI BATAS
1.	SANGAT TERTINGGAL	$\leq 0,491$
2.	TERTINGGAL	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3.	BERKEMBANG	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4	MAJU	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5.	MANDIRI	$> 0,815$

**Tabel 2.5**  
**Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)**  
**Kabupaten Way Kanan**  
**Periode 2016-2021/2021-2026**

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Desa Mandiri	-	-	-	-	-	1	10
2	Desa Maju	-	-	2	3	20	29	54
3	Desa Berkembang	-	-	103	134	180	172	155
4	Desa Tertinggal	-	-	106	78	21	19	2
5	Desa Sangat Tertinggal	-	-	10	6	-	-	-

(Sumber Data : Kemendes, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia).

**Tabel. 2.6**  
**Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun**  
**Kabupaten Way Kanan Tahun 2018**

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
1	Negeri Baru	Blambangan Umpu	0,7276	Maju
2	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	0,7092	Maju
3	Karang Umpu	Blambangan Umpu	0,6137	Berkembang
4	Gistang	Blambangan Umpu	0.6120	Berkembang
5	Sidoarjo	Blambangan Umpu	0,6230	Berkembang

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
6	Bumi Ratu	Blambangan Umpu	0,6751	Berkembang
7	Lembasung	Blambangan Umpu	0,6079	Berkembang
8	Umpu Bhakti	Blambangan Umpu	0,6425	Berkembang
9	Sangkaran Bakti	Blambangan Umpu	0,6117	Berkembang
10	Bumi Baru	Blambangan Umpu	0,6757	Berkembang
11	Sriwijaya	Blambangan Umpu	0,6468	Berkembang
12	Bratha Yudha	Blambangan Umpu	0,6400	Berkembang
13	Panca Negeri	Blambangan Umpu	0,6230	Berkembang
14	Jaya Tinggi	Kasui	0,6901	Berkembang
15	Bali Sadar	Banjit	0,6187	Berkembang
16	Donomulyo	Banjit	0,6325	Berkembang
17	Bali Sadar Utara	Banjit	0,6695	Berkembang
18	Bali Sadar Selatan	Banjit	0,6119	Berkembang
19	Argomulyo	Banjit	0,6462	Berkembang
20	Setia Negara	Baradatu	0,6775	Berkembang
21	Gedung Pakuon	Baradatu	0,6413	Berkembang
22	Bumi Merapi	Baradatu	0,6024	Berkembang
23	Gunung Katun	Baradatu	0,6413	Berkembang
24	Bakti Negara	Baradatu	0,6667	Berkembang
25	Bumi Rejo	Baradatu	0,6383	Berkembang
26	Sukosari	Baradatu	0,6025	Berkembang
27	Gedung Rejo	Baradatu	0,6019	Berkembang
28	Cugah	Baradatu	0,6114	Berkembang
29	Tiuh Balak I	Baradatu	0,6229	Berkembang
30	Tiuh Balak	Baradatu	0,6857	Berkembang
31	Mekar Asri	Baradatu	0,6481	Berkembang
32	Banjar Negara	Baradatu	0,6000	Berkembang
33	Banjar Mulya	Baradatu	0,6290	Berkembang
34	Banjar Baru	Baradatu	0,6310	Berkembang
35	Serdang Kuring	Bahuga	0,6994	Berkembang
36	Suka Bumi	Pakuan Ratu	0,7065	Berkembang
37	Tanjung Agung	Pakuan Ratu	0,6249	Berkembang

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
38	Tanjung Serupa	Pakuan Ratu	0,5995	Berkembang
39	Negara Harja	Pakuan Ratu	0,6381	Berkembang
40	Bakti Negara	Pakuan Ratu	0,6395	Berkembang
41	Pakuan Baru	Pakuan Ratu	0,6960	Berkembang
42	Negara Tama	Pakuan Ratu	0,6248	Berkembang
43	Way Tawar	Pakuan Ratu	0,6470	Berkembang
44	Pakuan Sakti	Pakuan Ratu	0,5994	Berkembang
45	Serupa Indah	Pakuan Ratu	0,6795	Berkembang
46	Bumi Mulya	Pakuan Ratu	0,6827	Berkembang
47	Gedung Harapan	Negeri Agung	0,6456	Berkembang
48	Tanjung Rejo	Negeri Agung	0,6411	Berkembang
49	Way Tuba	Way Tuba	0,6656	Berkembang
50	Karya Jaya	Way Tuba	0,6319	Berkembang
51	Say Umpu	Way Tuba	0,6249	Berkembang
52	Suma Mukti	Way Tuba	0,6417	Berkembang
53	Ramsai	Way Tuba	0,6271	Berkembang
54	Bandar Sari	Way Tuba	0,6435	Berkembang
55	Bukit Gemuruh	Way Tuba	0,6121	Berkembang
56	Way Pisang	Way Tuba	0,6587	Berkembang
57	Way Tuba Asri	Way Tuba	0,6287	Berkembang
58	Lebak Peniangan	Rebang Tangkas	0,6583	Berkembang
59	Tanjung Tiga	Rebang Tangkas	0,6308	Berkembang
60	Madang Jaya	Rebang Tangkas	0,6092	Berkembang
61	Air Ringkih	Rebang Tangkas	0,6343	Berkembang
62	Gunung Sari	Rebang Tangkas	0,6665	Berkembang
63	Simpang Tiga	Rebang Tangkas	0,6116	Berkembang
64	Tanjung Raya	Rebang Tangkas	0,7009	Berkembang
65	Beringin Jaya	Rebang Tangkas	0,6343	Berkembang
66	Mulya Jaya	Rebang Tangkas	0,6057	Berkembang
67	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	0,6490	Berkembang

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
68	Gunung Baru	Gunung Labuhan	0,6306	Berkembang
69	Banjar Sakti	Gunung Labuhan	0,6778	Berkembang
70	Suka Negeri	Gunung Labuhan	0,6067	Berkembang
71	Gunung Sari	Gunung Labuhan	0,6060	Berkembang
72	Way Tuba	Gunung Labuhan	0,6040	Berkembang
73	Bengkulu	Gunung Labuhan	0,6533	Berkembang
74	Bengkulu Rejo	Gunung Labuhan	0,6024	Berkembang
75	Kayu Batu	Gunung Labuhan	0,6489	Berkembang
76	Bengkulu Jaya	Gunung Labuhan	0,6703	Berkembang
77	Banjar Ratu	Gunung Labuhan	0,6492	Berkembang
78	Negeri Ujan Mas	Gunung Labuhan	0,6078	Berkembang
79	Purwa Agung	Negara Batin	0,6998	Berkembang
80	Sri Mulyo	Negara Batin	0,6117	Berkembang
81	Sri Menanti	Negara Batin	0,6090	Berkembang
82	Gisting Jaya	Negara Batin	0,6698	Berkembang
83	Marga Jaya	Negara Batin	0,6510	Berkembang
84	Bumi Jaya	Negara Batin	0,6311	Berkembang
85	Adi Jaya	Negara Batin	0,6249	Berkembang
86	Sari Jaya	Negara Batin	0,6041	Berkembang
87	Kota Jawa	Negara Batin	0,6152	Berkembang
88	Tegal Mukti	Negeri Besar	0,7068	Berkembang
89	Sri Basuki	Negeri Besar	0,6623	Berkembang
90	Kali Awi Indah	Negeri Besar	0,6227	Berkembang
91	Negeri Jaya	Negeri Besar	0,6737	Berkembang
92	Bumi Harjo	Buay Bahuga	0,6575	Berkembang
93	Punjul Agung	Buay Bahuga	0,6914	Berkembang
94	Sri Tunggal	Buay Bahuga	0,6157	Berkembang
95	Suka Bumi	Buay Bahuga	0,6214	Berkembang
96	Suka Agung	Buay Bahuga	0,6475	Berkembang
97	Suka Dana	Buay Bahuga	0,6022	Berkembang
98	Nuar Maju	Buay Bahuga	0,6800	Berkembang

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
99	Lebung Lawe	Buay Bahuga	0,6583	Berkembang
100	Way Agung	Buay Bahuga	0,6957	Berkembang
101	Pisang Baru	Bumi Agung	0,6943	Berkembang
102	Pisang Indah	Bumi Agung	0,6825	Berkembang
103	Bumi Agung	Bumi Agung	0,6471	Berkembang
104	Wonoharjo	Bumi Agung	0,6190	Berkembang
105	Suka Maju	Bumi Agung	0,6116	Berkembang
106	Rambang Jaya	Blambangan Umpu	0.5689	Tertinggal
107	Negeri Batin	Blambangan Umpu	0.5862	Tertinggal
108	Gunung Sangkaran	Blambangan Umpu	0,5933	Tertinggal
109	Segara Mider	Blambangan Umpu	0,5000	Tertinggal
110	Tanjung Sari	Blambangan Umpu	0,5689	Tertinggal
111	Sri Rejeki	Blambangan Umpu	0,5116	Tertinggal
112	Umpu Kencana	Blambangan Umpu	0,5375	Tertinggal
113	Gedung Batin	Blambangan Umpu	0,5444	Tertinggal
114	Tanjung Raja Sakti	Blambangan Umpu	0,5100	Tertinggal
115	Negeri Bumi Putra	Blambangan Umpu	0,5711	Tertinggal
116	Gedung Riang	Blambangan Umpu	0,5429	Tertinggal
117	Ojolali	Blambangan Umpu	0,5425	Tertinggal
118	Datar Bancong	Kasui	0,5795d	Tertinggal
119	Kedaton	Kasui	0,5607	Tertinggal
120	Karang Lantang	Kasui	0,5707	Tertinggal
121	Kasui Lama	Kasui	0,5408	Tertinggal
122	Kampung Baru	Kasui	0,5200	Tertinggal
123	Jukuh Kemuning	Kasui	0,5310	Tertinggal
124	Kota Way	Kasui	0,5859	Tertinggal
125	Tanjung Kurung	Kasui	0,5932	Tertinggal
126	Talang Mangga	Kasui	0,5706	Tertinggal

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
127	Tanjung Harapan	Kasui	0,5634	Tertinggal
128	Sinar Gading	Kasui	0,5738	Tertinggal
129	Sukajadi	Kasui	0,5782	Tertinggal
130	Gelombang Panjang	Kasui	0,5892	Tertinggal
131	Tangkas	Kasui	0,5236	Tertinggal
132	Tanjung Bulan	Kasui	0,5989	Tertinggal
133	Tanjung Kurung Lama	Kasui	0,5298	Tertinggal
134	Bukit Batu	Kasui	0,5635	Tertinggal
135	Bunglai	Banjit	0,5111	Tertinggal
136	Campang Lapan	Banjit	0,5649	Tertinggal
137	Sumber Baru	Banjit	0,5389	Tertinggal
138	Rantau Temiang	Banjit	0,5943	Tertinggal
139	Juku Batu	Banjit	0,5706	Tertinggal
140	Rantau Jaya	Banjit	0,5297	Tertinggal
141	Bunglai	Banjit	0,6027	Tertinggal
142	Simpang Asam	Banjit	0,5837	Tertinggal
143	Bandar Agung	Banjit	0,5689	Tertinggal
144	Kemu	Banjit	0,5665	Tertinggal
145	Menanga Siamang	Banjit	0,5521	Tertinggal
146	Neki	Banjit	0,5350	Tertinggal
147	Sumber Sari	Banjit	0,5203	Tertinggal
148	Banjar Sari	Baradatu	0.5944	Tertinggal
149	Banjar Setia	Baradatu	0.5727	Tertinggal
150	Banjar Agung	Baradatu	0.5668	Tertinggal
151	Banjar Masin	Baradatu	0.5465	Tertinggal
152	Tulang Bawang	Bahuga	0,5837	Tertinggal
153	Mesir Udik	Bahuga	0,5317	Tertinggal
154	Mesir Ilir	Bahuga	0,5973	Tertinggal
155	Saptorenggo	Bahuga	0,5471	Tertinggal
156	Giri Harjo	Bahuga	0,5729	Tertinggal
157	Bumi Agung Watas	Bahuga	0,5657	Tertinggal
158	Bumi Agung	Bahuga	0,5430	Tertinggal
159	Mekar Jaya	Bahuga	0,5652	Tertinggal
160	Kota Dewa	Bahuga	0,5914	Tertinggal
161	Dewa Agung	Bahuga	0,5679	Tertinggal
162	Tanjung Ratu	Pakuan Ratu	0,5503	Tertinggal
163	Negeri Agung	Negeri Agung	0,5598	Tertinggal



<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
164	Bandar Dalam	Negeri Agung	0,5732	Tertinggal
165	Pulau Batu	Negeri Agung	0,5560	Tertinggal
166	Penengahan	Negeri Agung	0,5538	Tertinggal
167	Karya Agung	Negeri Agung	0,5894	Tertinggal
168	Sunsang	Negeri Agung	0,5927	Tertinggal
169	Kota Baru	Negeri Agung	0,5354	Tertinggal
170	Kotabumi	Negeri Agung	0,5948	Tertinggal
171	Gedung Menang	Negeri Agung	0,5371	Tertinggal
172	Kalipapan	Negeri Agung	0,5395	Tertinggal
173	Mulyasari	Negeri Agung	0,5859	Tertinggal
174	Way Limau	Negeri Agung	0,5368	Tertinggal
175	Gedung Jaya	Negeri Agung	0,5444	Tertinggal
176	Rejosari	Negeri Agung	0,5637	Tertinggal
177	Bandar Kasih	Negeri Agung	0,5286	Tertinggal
178	Sumber Rezeki	Negeri Agung	0,5789	Tertinggal
179	Mulya Agung	Negeri Agung	0,5938	Tertinggal
180	Beringin Jaya	Way Tuba	0,5539	Tertinggal
181	Bumi Dana	Way Tuba	0,5952	Tertinggal
182	Way Mencar	Way Tuba	0,5873	Tertinggal
183	Bukit Harapan	Way Tuba	0,5932	Tertinggal
184	Karya Maju	Rebang Tangkas	0,5794	Tertinggal
185	Negeri Mulyo	Gunung Labuhan	0,5737	Tertinggal
186	Negeri Sungkai	Gunung Labuhan	0,5930	Tertinggal
187	Bengkulu Raman	Gunung Labuhan	0,5627	Tertinggal
188	Tiuh Balak II	Gunung Labuhan	0,5908	Tertinggal
189	Curup Patah	Gunung Labuhan	0,5914	Tertinggal
190	Suka Rame	Gunung Labuhan	0,5986	Tertinggal
191	Bengkulu Tengah	Gunung Labuhan	0,5665	Tertinggal
192	Gunung Pekuwon	Gunung Labuhan	0,5538	Tertinggal
193	Labuhan Jaya	Gunung Labuhan	0,5762	Tertinggal
194	Negara Batin	Negara Batin	0,5876	Tertinggal
195	Purwa Negara	Negara Batin	0,5862	Tertinggal

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
196	Setia Negara	Negara Batin	0,5805	Tertinggal
197	Gedung Jaya	Negara Batin	0,5649	Tertinggal
198	Negeri Besar	Negeri Besar	0,5311	Tertinggal
199	Kiling-kiling	Negeri Besar	0,5275	Tertinggal
200	Kali Awi	Negeri Besar	0,5408	Tertinggal
201	Tiuh Baru	Negeri Besar	0,5584	Tertinggal
202	Bima Sakti	Negeri Besar	0,5970	Tertinggal
203	Negara Jaya	Negeri Besar	0,5816	Tertinggal
204	Pagar Iman	Negeri Besar	05875	Tertinggal
205	Tanjungmas	Negeri Besar	0,5371	Tertinggal
206	Negeri Kasih	Negeri Besar	0,5179	Tertinggal
207	Srinumpi	Bumi Agung	0,5695	Tertinggal
208	Mulyoharjo	Bumi Agung	0,5800	Tertinggal
209	Karangan	Bumi Agung	0,5633	Tertinggal
210	Tanjung Dalam	Bumi Agung	0,5424	Tertinggal
211	Bumi Say Agung	Bumi Agung	0,5276	Tertinggal
212	Tanjung Raja Giham	Blambangan Umpu	0,4100	Sangat Tertinggal
213	Menanga Jaya	Banjit	0,4844	Sangat Tertinggal
214	Karang Agung	Pakuan Ratu	0,4687	Sangat Tertinggal
215	Gunung Cahya	Pakuan Ratu	0,4875	Sangat Tertinggal
216	Rumbih	Pakuan Ratu	0,4890	Sangat Tertinggal
217	Negara Ratu	Pakuan Ratu	0,4579	Sangat Tertinggal
218	Negara Sakti	Pakuan Ratu	0,4857	Sangat Tertinggal
219	Gunung Waras	Pakuan Ratu	0,4794	Sangat Tertinggal
220	Karta Jaya	Negara Batin	0,3770	Sangat Tertinggal
221	Negara Mulya	Negara Batin	0,4438	Sangat Tertinggal

(Sumber Data : Kemendes, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia).

**Tabel. 2.7**  
 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun  
 Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
1	Negeri Baru	Blambangan Umpu	0,7522	Maju
2	Pisang Baru	Bumi Agung	0,7175	Maju
3	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	0,7154	Maju
4	Rambang Jaya	Blambangan Umpu	0,5995	Berkembang
5	Gistang	Blambangan Umpu	0,6032	Berkembang
6	Sidoarjo	Blambangan Umpu	0,6595	Berkembang
7	Bumi Ratu	Blambangan Umpu	0,6970	Berkembang
8	Lembasung	Blambangan Umpu	0,6143	Berkembang
9	Gunung Sangkaran	Blambangan Umpu	0,6068	Berkembang
10	Umpu Bhakti	Blambangan Umpu	0,6408	Berkembang
11	Sangkaran Bakti	Blambangan Umpu	0,7056	Berkembang
12	Bumi Baru	Blambangan Umpu	0,6775	Berkembang
13	Tanjung Sari	Blambangan Umpu	0,6573	Berkembang
14	Karang Umpu	Blambangan Umpu	0,6257	Berkembang
15	Umpu Kencana	Blambangan Umpu	0,6424	Berkembang
16	Sriwijaya	Blambangan Umpu	0,6390	Berkembang
17	Bratha Yudha	Blambangan Umpu	0,6614	Berkembang
18	Gedung Batin	Blambangan Umpu	0,6122	Berkembang
19	Negeri Bumi Putra	Blambangan Umpu	0,6725	Berkembang
20	Panca Negeri	Blambangan Umpu	0,6594	Berkembang

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
21	Gedung Riang	Blambangan Umpu	0,6013	Berkembang
22	Ojolali	Blambangan Umpu	0,6179	Berkembang
23	KASUI LAMA	KASUI	0,6063	Berkembang
24	TANJUNG KURUNG	KASUI	0,6248	Berkembang
25	JAYA TINGGI	KASUI	0,6549	Berkembang
26	TANJUNG BULAN	KASUI	0,6068	Berkembang
27	BALI SADAR TENGAH	BANJIT	0,6384	Berkembang
28	DONOMULYO	BANJIT	0,603	Berkembang
29	BALI SADAR UTARA	BANJIT	0,6329	Berkembang
30	BALI SADAR SELATAN	BANJIT	0,6189	Berkembang
31	ARGOMULYO	BANJIT	0,6457	Berkembang
32	BANDAR AGUNG	BANJIT	0,5995	Berkembang
33	Setia Negara	Baradatu	0,7005	Berkembang
34	Gedung Pakuon	Baradatu	0,6271	Berkembang
35	Bumi Merapi	Baradatu	0,6575	Berkembang
36	Banjar Sari	Baradatu	0,6459	Berkembang
37	Gunung Katun	Baradatu	0,6476	Berkembang
38	Bakti Negara	Baradatu	0,6824	Berkembang
39	Bumi Rejo	Baradatu	0,6594	Berkembang
40	Sukosari	Baradatu	0,6157	Berkembang
41	Gedung Rejo	Baradatu	0,6876	Berkembang
42	Banjar Agung	Baradatu	0,6140	Berkembang
43	Cugah	Baradatu	0,6479	Berkembang
44	Tiuh Balak I	Baradatu	0,6302	Berkembang
45	Tiuh Balak	Baradatu	0,6978	Berkembang
46	Mekar Asri	Baradatu	0,6821	Berkembang
47	Banjar Negara	Baradatu	0,6997	Berkembang
48	Banjar Masin	Baradatu	0,6346	Berkembang
49	Banjar Mulya	Baradatu	0,6721	Berkembang
50	Banjar Baru	Baradatu	0,6646	Berkembang
51	Mesir Ilir	Bahuga	0,6076	Berkembang
52	Serdang Kuring	Bahuga	0,6244	Berkembang
53	TANJUNG RATU	PAKUAN RATU	0,6376	Berkembang
54	PAKUAN RATU	PAKUAN RATU	0,5997	Berkembang
55	SUKA BUMI	PAKUAN RATU	0,6937	Berkembang

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
56	TANJUNG SERUPA	PAKUAN RATU	0,6408	Berkembang
57	NEGARA HARJA	PAKUAN RATU	0,6346	Berkembang
58	BAKTI NEGARA	PAKUAN RATU	0,6030	Berkembang
59	PAKUAN BARU	PAKUAN RATU	0,6725	Berkembang
60	PAKUAN SAKTI	PAKUAN RATU	0,6203	Berkembang
61	SERUPA INDAH	PAKUAN RATU	0,6868	Berkembang
62	BUMI MULYA	PAKUAN RATU	0,6460	Berkembang
63	Kotabumi	Negeri Agung	0,6181	Berkembang
64	Gedung Harapan	Negeri Agung	0,6054	Berkembang
65	Tanjung Rejo	Negeri Agung	0,6867	Berkembang
66	Kalipapan	Negeri Agung	0,6590	Berkembang
67	Way Tuba	Way Tuba	0,6989	Berkembang
68	Karya Jaya	Way Tuba	0,6640	Berkembang
69	Say Umpu	Way Tuba	0,6484	Berkembang
70	Beringin Jaya	Way Tuba	0,6275	Berkembang
71	Suma Mukti	Way Tuba	0,6613	Berkembang
72	Ramsai	Way Tuba	0,6735	Berkembang
73	Bandar Sari	Way Tuba	0,6887	Berkembang
74	Bumi Dana	Way Tuba	0,6613	Berkembang
75	Bukit Gemuruh	Way Tuba	0,6849	Berkembang
76	Way Pisang	Way Tuba	0,6781	Berkembang
77	Way Tuba Asri	Way Tuba	0,6800	Berkembang
78	Lebak Peniangan	Rebang Tangkas	0,6371	Berkembang
79	Tanjung Tiga	Rebang Tangkas	0,6095	Berkembang
80	Madang Jaya	Rebang Tangkas	0,6421	Berkembang
81	Air Ringkih	Rebang Tangkas	0,6010	Berkembang
82	Gunung Sari	Rebang Tangkas	0,6043	Berkembang
83	Simpang Tiga	Rebang Tangkas	0,6290	Berkembang
84	Tanjung Raya	Rebang Tangkas	0,6643	Berkembang
85	Beringin Jaya	Rebang Tangkas	0,6330	Berkembang
86	Mulya Jaya	Rebang Tangkas	0,6057	Berkembang

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
87	Gunung Baru	Gunung Labuhan	0,6273	Berkembang
88	Banjar Sakti	Gunung Labuhan	0,6144	Berkembang
89	Suka Negeri	Gunung Labuhan	0,6495	Berkembang
90	Negeri Mulyo	Gunung Labuhan	0,6011	Berkembang
91	Negeri Sungkai	Gunung Labuhan	0,6308	Berkembang
92	Gunung Sari	Gunung Labuhan	0,6310	Berkembang
93	Way Tuba	Gunung Labuhan	0,6305	Berkembang
94	Bengkulu	Gunung Labuhan	0,6483	Berkembang
95	Bengkulu Rejo	Gunung Labuhan	0,6143	Berkembang
96	Kayu Batu	Gunung Labuhan	0,6627	Berkembang
97	Bengkulu Raman	Gunung Labuhan	0,5992	Berkembang
98	Bengkulu Jaya	Gunung Labuhan	0,6098	Berkembang
99	Tiuh Balak II	Gunung Labuhan	0,6084	Berkembang
100	Curup Patah	Gunung Labuhan	0,6106	Berkembang
101	Suka Rame	Gunung Labuhan	0,6473	Berkembang
102	Banjar Ratu	Gunung Labuhan	0,6265	Berkembang
103	Negeri Ujan Mas	Gunung Labuhan	0,6570	Berkembang
104	Bengkulu Tengah	Gunung Labuhan	0,6011	Berkembang
105	Gunung Pekuwon	Gunung Labuhan	0,6275	Berkembang
106	Labuhan Jaya	Gunung Labuhan	0,6087	Berkembang
107	NEGARA BATIN	Negara Batin	0,6354	Berkembang
108	PURWA AGUNG	Negara Batin	0,6390	Berkembang
109	PURWA NEGARA	Negara Batin	0,6371	Berkembang

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
110	SETIA NEGARA	Negara Batin	0,6514	Berkembang
111	SRI MULYO	Negara Batin	0,6297	Berkembang
112	GISTING JAYA	Negara Batin	0,6960	Berkembang
113	MARGA JAYA	Negara Batin	0,6738	Berkembang
114	BUMI JAYA	Negara Batin	0,6540	Berkembang
115	GEDUNG JAYA	Negara Batin	0,6392	Berkembang
116	ADI JAYA	Negara Batin	0,6798	Berkembang
117	SARI JAYA	Negara Batin	0,6738	Berkembang
118	KOTA JAWA	Negara Batin	0,6919	Berkembang
119	Negeri Besar	Negeri Besar	0,6170	Berkembang
120	Tiuh Baru	Negeri Besar	0,6019	Berkembang
121	Bima Sakti	Negeri Besar	0,6925	Berkembang
122	Tegal Mukti	Negeri Besar	0,7048	Berkembang
123	Negara Jaya	Negeri Besar	0,6251	Berkembang
124	Sri Basuki	Negeri Besar	0,6679	Berkembang
125	Kali Awi Indah	Negeri Besar	0,6029	Berkembang
126	Negeri Jaya	Negeri Besar	0,6424	Berkembang
127	Bumi Harjo	BUAY BAHUGA	0,7067	Berkembang
128	Punjul Agung	BUAY BAHUGA	0,6106	Berkembang
129	Sri Tunggal	BUAY BAHUGA	0,6737	Berkembang
130	Suka Bumi	BUAY BAHUGA	0,7029	Berkembang
131	Nuar Maju	BUAY BAHUGA	0,6240	Berkembang
132	Lebung Lawe	BUAY BAHUGA	0,6356	Berkembang
133	Way Agung	BUAY BAHUGA	0,6705	Berkembang
134	SRINUMPI	BUMI AGUNG	0,6262	Berkembang
135	BUMI AGUNG	BUMI AGUNG	0,7029	Berkembang
136	WONOHARJO	BUMI AGUNG	0,6513	Berkembang
137	SUKA MAJU	BUMI AGUNG	0,6830	Berkembang
138	Sri Rejeki	BLAMBANGAN UMPU	0,5900	Tertinggal
139	DATAR BANCONG	KASUI	0,5671	Tertinggal
140	KEDATON	KASUI	0,5694	Tertinggal
141	KARANG LANTANG	KASUI	0,5789	Tertinggal
142	KAMPUNG BARU	KASUI	0,5505	Tertinggal
143	JUKUH KEMUNING	KASUI	0,5730	Tertinggal
144	KOTA WAY	KASUI	0,5695	Tertinggal
145	TALANG MANGGA	KASUI	0,5454	Tertinggal

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
146	TANJUNG HARAPAN	KASUI	0,5506	Tertinggal
147	SINAR GADING	KASUI	0,5430	Tertinggal
148	SUKAJADI	KASUI	0,5865	Tertinggal
149	GELOMBANG PANJANG	KASUI	0,5767	Tertinggal
150	TANGKAS	KASUI	0,5673	Tertinggal
151	TANJUNG KURUNG LAMA	KASUI	0,5389	Tertinggal
152	BUKIT BATU	KASUI	0,5522	Tertinggal
153	BUNGLAI	BANJIT	0,5232	Tertinggal
154	CAMPANG LAPAN	BANJIT	0,5829	Tertinggal
155	SUMBER BARU	BANJIT	0,5786	Tertinggal
156	RANTAU TEMIANG	BANJIT	0,5670	Tertinggal
157	JUKU BATU	BANJIT	0,5173	Tertinggal
158	MENANGA JAYA	BANJIT	0,5598	Tertinggal
159	RANTAU JAYA	BANJIT	0,5975	Tertinggal
160	REBANG TINGGI	BANJIT	0,5956	Tertinggal
161	SIMPANG ASAM	BANJIT	0,5633	Tertinggal
162	KEMU	BANJIT	0,5862	Tertinggal
163	MENANGA SIAMANG	BANJIT	0,5514	Tertinggal
164	NEKI	BANJIT	0,5895	Tertinggal
165	SUMBER SARI	BANJIT	0,5629	Tertinggal
166	Banjar Setia	Baradatu	0,5976	Tertinggal
167	Tulang Bawang	Bahuga	0,5890	Tertinggal
168	Mesir Udik	Bahuga	0,5702	Tertinggal
169	Saptorenggo	Bahuga	0,5781	Tertinggal
170	Giri Harjo	Bahuga	0,5979	Tertinggal
171	Bumi Agung Watas	Bahuga	0,5852	Tertinggal
172	Bumi Agung	Bahuga	0,5833	Tertinggal
173	Mekar Jaya	Bahuga	0,5963	Tertinggal
174	Kota Dewa	Bahuga	0,5776	Tertinggal
175	Dewa Agung	Bahuga	0,5835	Tertinggal
176	GUNUNG CAHYA	PAKUAN RATU	0,5954	Tertinggal
177	RUMBIH	PAKUAN RATU	0,5167	Tertinggal
178	NEGARA RATU	PAKUAN RATU	0,5186	Tertinggal
179	NEGARA SAKTI	PAKUAN RATU	0,5071	Tertinggal



<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
180	TANJUNG AGUNG	PAKUAN RATU	0,5830	Tertinggal
181	NEGARA TAMA	PAKUAN RATU	0,5806	Tertinggal
182	WAY TAWAR	PAKUAN RATU	0,5979	Tertinggal
183	GUNUNG WARAS	PAKUAN RATU	0,5148	Tertinggal
184	Negeri Agung	Negeri Agung	0,5198	Tertinggal
185	Bandar Dalam	Negeri Agung	0,5256	Tertinggal
186	Pulau Batu	Negeri Agung	0,5662	Tertinggal
187	Penengahan	Negeri Agung	0,5841	Tertinggal
188	Karya Agung	Negeri Agung	0,5787	Tertinggal
189	Sunsang	Negeri Agung	0,5989	Tertinggal
190	Kota Baru	Negeri Agung	0,5921	Tertinggal
191	Gedung Menang	Negeri Agung	0,5924	Tertinggal
192	Mulyasari	Negeri Agung	0,5313	Tertinggal
193	Way Limau	Negeri Agung	0,5217	Tertinggal
194	Gedung Jaya	Negeri Agung	0,5930	Tertinggal
195	Rejosari	Negeri Agung	0,5237	Tertinggal
196	Bandar Kasih	Negeri Agung	0,5275	Tertinggal
197	Sumber Rezeki	Negeri Agung	0,5917	Tertinggal
198	Mulya Agung	Negeri Agung	0,5160	Tertinggal
199	Way Mencar	Way Tuba	0,5290	Tertinggal
200	Bukit Harapan	Way Tuba	0,5422	Tertinggal
201	Karya Maju	REBANG TANGKAS	0,5802	Tertinggal
202	SRI MENANTI	NEGARA BATIN	0,5392	Tertinggal
203	NEGARA MULYA	NEGARA BATIN	0,4921	Tertinggal
204	Kiling-kiling	Negeri Besar	0,5717	Tertinggal
205	Kali Awi	Negeri Besar	0,5205	Tertinggal
206	Pagar Iman	Negeri Besar	0,5803	Tertinggal
207	Tanjungmas	Negeri Besar	0,5730	Tertinggal
208	Negeri Kasih	Negeri Besar	0,5879	Tertinggal
209	Suka Agung	BUAY BAHUGA	0,5160	Tertinggal
210	Suka Dana	BUAY BAHUGA	0,5963	Tertinggal
211	PISANG INDAH	BUMI AGUNG	0,5906	Tertinggal
212	MULYOHARJO	BUMI AGUNG	0,5732	Tertinggal
213	KARANGAN	BUMI AGUNG	0,5465	Tertinggal
214	TANJUNG DALOM	BUMI AGUNG	0,5617	Tertinggal
215	BUMI SAY AGUNG	BUMI AGUNG	0,5637	Tertinggal
216	Negeri Batin	Blambangan Umpu	0,4348	Sangat Tertinggal

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
217	Tanjung Raja Giham	Blambangan Umpu	0,3940	Sangat Tertinggal
218	Segara Mider	Blambangan Umpu	0,3940	Sangat Tertinggal
219	Tanjung Raja Sakti	Blambangan Umpu	0,3940	Sangat Tertinggal
220	Karang Agung	Pakuan Ratu	0,4846	Sangat Tertinggal
221	Karta Jaya	Negara Batin	0,4587	Sangat Tertinggal

(Sumber Data : Kemendes, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia).

**Tabel. 2.8**  
 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun  
 Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
1	NEGERI BARU	BLAMBANGAN UMPU	0.7767	MAJU
2	GUNUNG SANGKARAN	BLAMBANGAN UMPU	0.7073	MAJU
3	SETIA NEGARA	BARADATU	0.7081	MAJU
4	GUNUNG KATUN	BARADATU	0.7606	MAJU
5	BHAKTI NEGARA	BARADATU	0.7102	MAJU
6	MEKAR ASRI	BARADATU	0.7246	MAJU
7	SERUPA INDAH	PAKUAN RATU	0.7078	MAJU
8	GEDUNG HARAPAN	NEGERI AGUNG	0.7132	MAJU
9	TANJUNG REJO	NEGERI AGUNG	0.7208	MAJU
10	KALI PAPAN	NEGERI AGUNG	0.7210	MAJU
11	WAY TUBA	WAY TUBA	0.7224	MAJU
12	LEBAK PENIANGAN	REBANG TANGKAS	0.7911	MAJU
13	GUNUNG SARI	REBANG TANGKAS	0.7098	MAJU
14	GUNUNG LABUHAN	GUNUNG LABUHAN	0.7354	MAJU
15	BUMI JAYA	NEGARA BATIN	0.7302	MAJU

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
16	ADI JAYA	NEGARA BATIN	0.7552	MAJU
17	TEGAL MUKTI	NEGERI BESAR	0.7395	MAJU
18	NEGERI JAYA	NEGERI BESAR	0.7583	MAJU
19	PISANG BARU	BUMI AGUNG	0.7735	MAJU
20	BUMI AGUNG	BUMI AGUNG	0.7308	MAJU
21	RAMBANG JAYA	BLAMBANGAN UMPU	0.6098	BERKEMBANG
22	GISTANG	BLAMBANGAN UMPU	0.6213	BERKEMBANG
23	SIDOARJO	BLAMBANGAN UMPU	0.6705	BERKEMBANG
24	BUMI RATU	BLAMBANGAN UMPU	0.6690	BERKEMBANG
25	LEMBASUNG	BLAMBANGAN UMPU	0.6479	BERKEMBANG
26	UMPU BHAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.6465	BERKEMBANG
27	SANGKARAN BHAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.6330	BERKEMBANG
28	BUMI BARU	BLAMBANGAN UMPU	0.6359	BERKEMBANG
29	TANJUNG SARI	BLAMBANGAN UMPU	0.6402	BERKEMBANG
30	SRI REJEKI	BLAMBANGAN UMPU	0.6221	BERKEMBANG
31	KARANG UMPU	BLAMBANGAN UMPU	0.6338	BERKEMBANG
32	UMPU KENCANA	BLAMBANGAN UMPU	0.6444	BERKEMBANG
33	SRIWIJAYA	BLAMBANGAN UMPU	0.6817	BERKEMBANG
34	BRATA YUDHA	BLAMBANGAN UMPU	0.7040	BERKEMBANG
35	GEDUNG BATIN	BLAMBANGAN UMPU	0.6771	BERKEMBANG
36	NEGERI BUMI PUTRA	BLAMBANGAN UMPU	0.6952	BERKEMBANG
37	GEDUNG RIANG	BLAMBANGAN UMPU	0.6254	BERKEMBANG

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
38	OJO LALI	BLAMBANGAN UMPU	0.6270	BERKEMBANG
39	DATAR BANCONG	KASUI	0.6314	BERKEMBANG
40	KEDATON	KASUI	0.6292	BERKEMBANG
41	KARANG LANTANG	KASUI	0.6814	BERKEMBANG
42	KASUI LAMA	KASUI	0.6557	BERKEMBANG
43	KAMPUNG BARU	KASUI	0.6273	BERKEMBANG
44	JUKUH KEMUNING	KASUI	0.6110	BERKEMBANG
45	KOTA WAY	KASUI	0.6703	BERKEMBANG
46	TANJUNG KURUNG	KASUI	0.6098	BERKEMBANG
47	TALANG MANGGA	KASUI	0.6432	BERKEMBANG
48	TANJUNG HARAPAN	KASUI	0.6756	BERKEMBANG
49	SINAR GADING	KASUI	0.6787	BERKEMBANG
50	JAYA TINGGI	KASUI	0.6975	BERKEMBANG
51	SUKA JADI	KASUI	0.6721	BERKEMBANG
52	GELOMBANG PANJANG	KASUI	0.6648	BERKEMBANG
53	TANGKAS	KASUI	0.6348	BERKEMBANG
54	TANJUNG BULAN	KASUI	0.6459	BERKEMBANG
55	TANJUNGKURUNG LAMA	KASUI	0.6357	BERKEMBANG
56	BUKITBATU	KASUI	0.6246	BERKEMBANG
57	CAMPANG LAPAN	BANJIT	0.6049	BERKEMBANG
58	SUMBER BARU	BANJIT	0.6124	BERKEMBANG
59	JUKU BATU	BANJIT	0.6124	BERKEMBANG
60	BALI SADAR	BANJIT	0.6663	BERKEMBANG
61	DONO MULYO	BANJIT	0.6390	BERKEMBANG
62	BALI SADAR UTARA	BANJIT	0.6962	BERKEMBANG
63	BALI SADAR SELATAN	BANJIT	0.6729	BERKEMBANG
64	MENANGA JAYA	BANJIT	0.6179	BERKEMBANG
65	ARGO MULYO	BANJIT	0.6214	BERKEMBANG
66	RANTAU JAYA	BANJIT	0.6108	BERKEMBANG
67	REBANG TINGGI	BANJIT	0.6125	BERKEMBANG
68	SIMPANG ASAM	BANJIT	0.6075	BERKEMBANG
69	BANDAR AGUNG	BANJIT	0.6306	BERKEMBANG
70	KEMU	BANJIT	0.6048	BERKEMBANG
71	NEKI	BANJIT	0.6013	BERKEMBANG
72	SUMBER SARI	BANJIT	0.6068	BERKEMBANG
73	GEDUNG PAKUON	BARADATU	0.6719	BERKEMBANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
74	BUMI MERAPI	BARADATU	0.6549	BERKEMBANG
75	BANJAR SARI	BARADATU	0.6402	BERKEMBANG
76	BUMI REJO	BARADATU	0.6630	BERKEMBANG
77	SUKOSARI	BARADATU	0.6367	BERKEMBANG
78	BANJAR SETIA	BARADATU	0.6257	BERKEMBANG
79	GEDUNG REJO	BARADATU	0.6973	BERKEMBANG
80	BANJAR AGUNG	BARADATU	0.6249	BERKEMBANG
81	CUGAH	BARADATU	0.6324	BERKEMBANG
82	TIUH BALAK I	BARADATU	0.6832	BERKEMBANG
83	TIUH BALAK	BARADATU	0.6846	BERKEMBANG
84	BANJAR NEGARA	BARADATU	0.6663	BERKEMBANG
85	BANJAR MASIN	BARADATU	0.6306	BERKEMBANG
86	BANJAR MULYA	BARADATU	0.6998	BERKEMBANG
87	BANJAR BARU	BARADATU	0.6871	BERKEMBANG
88	TULANG BAWANG	BAHUGA	0.6725	BERKEMBANG
89	MESIR ILIR	BAHUGA	0.6502	BERKEMBANG
90	SAPTO RENGGO	BAHUGA	0.6741	BERKEMBANG
91	GIRI HARJO	BAHUGA	0.6278	BERKEMBANG
92	BUMI AGUNG WATES	BAHUGA	0.6276	BERKEMBANG
93	SERDANG KURING	BAHUGA	0.6951	BERKEMBANG
94	BUMI AGUNG	BAHUGA	0.6094	BERKEMBANG
95	MEKAR JAYA	BAHUGA	0.6465	BERKEMBANG
96	PUTRA DEWA	BAHUGA	0.6149	BERKEMBANG
97	DEWA AGUNG	BAHUGA	0.6541	BERKEMBANG
98	TANJUNG RATU	PAKUAN RATU	0.6541	BERKEMBANG
99	PAKUAN RATU	PAKUAN RATU	0.6646	BERKEMBANG
100	RUMBIH	PAKUAN RATU	0.7052	BERKEMBANG
101	SUKABUMI	PAKUAN RATU	0.6981	BERKEMBANG
102	TANJUNG AGUNG	PAKUAN RATU	0.6498	BERKEMBANG
103	TANJUNG SERUPA	PAKUAN RATU	0.6495	BERKEMBANG
104	NEGARA HARJA	PAKUAN RATU	0.6529	BERKEMBANG
105	BAKTI NEGARA	PAKUAN RATU	0.6587	BERKEMBANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
106	PAKUAN BARU	PAKUAN RATU	0.6930	BERKEMBANG
107	NEGARA TAMA	PAKUAN RATU	0.6549	BERKEMBANG
108	WAY TAWAR	PAKUAN RATU	0.6033	BERKEMBANG
109	PAKUAN SAKTI	PAKUAN RATU	0.6997	BERKEMBANG
110	BUMI MULYA	PAKUAN RATU	0.6254	BERKEMBANG
111	NEGERI AGUNG	NEGERI AGUNG	0.6294	BERKEMBANG
112	BANDAR DALAM	NEGERI AGUNG	0.6317	BERKEMBANG
113	PULAU BATU	NEGERI AGUNG	0.6037	BERKEMBANG
114	KOTABUMI WAY KANAN	NEGERI AGUNG	0.6556	BERKEMBANG
115	GEDUNG MENENG	NEGERI AGUNG	0.6106	BERKEMBANG
116	MULYA SARI	NEGERI AGUNG	0.6594	BERKEMBANG
117	GEDUNG JAYA	NEGERI AGUNG	0.6344	BERKEMBANG
118	REJO SARI	NEGERI AGUNG	0.6610	BERKEMBANG
119	BANDAR KASIH	NEGERI AGUNG	0.6444	BERKEMBANG
120	SUMBER REJEKI	NEGERI AGUNG	0.6089	BERKEMBANG
121	MULYA AGUNG	NEGERI AGUNG	0.6333	BERKEMBANG
122	KARYA JAYA	WAY TUBA	0.6629	BERKEMBANG
123	SAY UMPU	WAY TUBA	0.6594	BERKEMBANG
124	BERINGIN JAYA	WAY TUBA	0.6657	BERKEMBANG
125	SUMA MUKTI	WAY TUBA	0.6390	BERKEMBANG
126	RAMSAI	WAY TUBA	0.6329	BERKEMBANG
127	BANDAR SARI	WAY TUBA	0.6737	BERKEMBANG
128	BUMI DANA	WAY TUBA	0.6278	BERKEMBANG
129	BUKIT GEMURUH	WAY TUBA	0.6094	BERKEMBANG
130	WAY MENCAR	WAY TUBA	0.6516	BERKEMBANG
131	WAY PISANG	WAY TUBA	0.6514	BERKEMBANG
132	BUKIT HARAPAN	WAY TUBA	0.6351	BERKEMBANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
133	WAY TUBA ASRI	WAY TUBA	0.6592	BERKEMBANG
134	TANJUNG TIGA	REBANG TANGKAS	0.6894	BERKEMBANG
135	MADANG JAYA	REBANG TANGKAS	0.6535	BERKEMBANG
136	AIR RINGKIH	REBANG TANGKAS	0.7054	BERKEMBANG
137	SIMPANG TIGA	REBANG TANGKAS	0.6643	BERKEMBANG
138	TANJUNG RAYA	REBANG TANGKAS	0.6737	BERKEMBANG
139	BERINGIN JAYA	REBANG TANGKAS	0.6637	BERKEMBANG
140	KARYA MAJU	REBANG TANGKAS	0.6349	BERKEMBANG
141	MULYA JAYA	REBANG TANGKAS	0.6444	BERKEMBANG
142	GUNUNG BARU	GUNUNG LABUHAN	0.6405	BERKEMBANG
143	BANJAR SAKTI	GUNUNG LABUHAN	0.6332	BERKEMBANG
144	SUKA NEGERI	GUNUNG LABUHAN	0.6292	BERKEMBANG
145	NEGERI MULYO	GUNUNG LABUHAN	0.6421	BERKEMBANG
146	NEGERI SINGKAI	GUNUNG LABUHAN	0.6308	BERKEMBANG
147	GUNUNG SARI	GUNUNG LABUHAN	0.6606	BERKEMBANG
148	WAY TUBA	GUNUNG LABUHAN	0.6660	BERKEMBANG
149	BENGKULU	GUNUNG LABUHAN	0.6851	BERKEMBANG
150	BENGKULU REJO	GUNUNG LABUHAN	0.6602	BERKEMBANG
151	KAYU BATU	GUNUNG LABUHAN	0.6643	BERKEMBANG
152	BENGKULU RAMAN	GUNUNG LABUHAN	0.6271	BERKEMBANG
153	BENGKULU JAYA	GUNUNG LABUHAN	0.6400	BERKEMBANG
154	TIUH BALAK II	GUNUNG LABUHAN	0.6275	BERKEMBANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
155	CURUP PATAH	GUNUNG LABUHAN	0.6570	BERKEMBANG
156	SUKARAME	GUNUNG LABUHAN	0.6646	BERKEMBANG
157	BANJAR RATU	GUNUNG LABUHAN	0.6363	BERKEMBANG
158	NEGERI UJAN MAS	GUNUNG LABUHAN	0.6594	BERKEMBANG
159	BENGKULU TENGAH	GUNUNG LABUHAN	0.6292	BERKEMBANG
160	GUNUNGPEKUWON	GUNUNG LABUHAN	0.6459	BERKEMBANG
161	LABUHAN JAYA	GUNUNG LABUHAN	0.6363	BERKEMBANG
162	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	0.6225	BERKEMBANG
163	PURWA AGUNG	NEGARA BATIN	0.6889	BERKEMBANG
164	PURWA NEGARA	NEGARA BATIN	0.6105	BERKEMBANG
165	SETIA NEGARA	NEGARA BATIN	0.6676	BERKEMBANG
166	SRI MULYO	NEGARA BATIN	0.6711	BERKEMBANG
167	SRI MENANTI	NEGARA BATIN	0.6056	BERKEMBANG
168	KARTA JAYA	NEGARA BATIN	0.6460	BERKEMBANG
169	GISTING JAYA	NEGARA BATIN	0.6798	BERKEMBANG
170	MARGA JAYA	NEGARA BATIN	0.6641	BERKEMBANG
171	GEDUNG JAYA	NEGARA BATIN	0.6522	BERKEMBANG
172	SARI JAYA	NEGARA BATIN	0.6681	BERKEMBANG
173	NEGARA MULYA	NEGARA BATIN	0.6370	BERKEMBANG
174	KOTA JAWA	NEGARA BATIN	0.6325	BERKEMBANG
175	NEGERI BESAR	NEGERI BESAR	0.6103	BERKEMBANG



<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
176	KILING-KILING	NEGERI BESAR	0.6249	BERKEMBANG
177	TIUH BARU	NEGERI BESAR	0.6179	BERKEMBANG
178	BIMA SAKTI	NEGERI BESAR	0.6779	BERKEMBANG
179	NEGARA JAYA	NEGERI BESAR	0.6832	BERKEMBANG
180	SRI BASUKI	NEGERI BESAR	0.6875	BERKEMBANG
181	KALIWI INDAH	NEGERI BESAR	0.6386	BERKEMBANG
182	TANJUNGMAS	NEGERI BESAR	0.6644	BERKEMBANG
183	NEGERI KASIH	NEGERI BESAR	0.6121	BERKEMBANG
184	BUMI HARJO	BUAY BAHUGA	0.7051	BERKEMBANG
185	PUNJUL AGUNG	BUAY BAHUGA	0.6663	BERKEMBANG
186	SRI TUNGGAL	BUAY BAHUGA	0.6716	BERKEMBANG
187	SUKA BUMI	BUAY BAHUGA	0.6833	BERKEMBANG
188	SUKA AGUNG	BUAY BAHUGA	0.7002	BERKEMBANG
189	SUKADANA	BUAY BAHUGA	0.6562	BERKEMBANG
190	NUAR MAJU	BUAY BAHUGA	0.6849	BERKEMBANG
191	LEBUNG LAWE	BUAY BAHUGA	0.6313	BERKEMBANG
192	WAY AGUNG	BUAY BAHUGA	0.6481	BERKEMBANG
193	PISANG INDAH	BUMI AGUNG	0.6413	BERKEMBANG
194	SRI NUMPI	BUMI AGUNG	0.6389	BERKEMBANG
195	MULYO HARJO	BUMI AGUNG	0.6348	BERKEMBANG
196	KARANGAN	BUMI AGUNG	0.6017	BERKEMBANG
197	WONO HARJO	BUMI AGUNG	0.6756	BERKEMBANG
198	SUKA MAJU	BUMI AGUNG	0.6886	BERKEMBANG
199	TANJUNG DALOM	BUMI AGUNG	0.6390	BERKEMBANG
200	BUMI SAY AGUNG	BUMI AGUNG	0.6232	BERKEMBANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
201	NEGERI BATIN	BLAMBANGAN UMPU	0.5883	TERTINGGAL
202	TANJUNG RAJA GIHAM	BLAMBANGAN UMPU	0.5540	TERTINGGAL
203	SEGARA MIDER	BLAMBANGAN UMPU	0.5298	TERTINGGAL
204	TANJUNG RAJA SAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.5781	TERTINGGAL
205	PANCA NEGERI	BLAMBANGAN UMPU	0.5421	TERTINGGAL
206	BUNGLAI	BANJIT	0.5898	TERTINGGAL
207	RANTAU TEMIANG	BANJIT	0.5967	TERTINGGAL
208	MENANGA SIAMANG	BANJIT	0.5794	TERTINGGAL
209	MESIR UDIK	BAHUGA	0.5833	TERTINGGAL
210	KARANG AGUNG	PAKUAN RATU	0.5222	TERTINGGAL
211	GUNUNG CAHYA	PAKUAN RATU	0.5694	TERTINGGAL
212	NEGARA RATU	PAKUAN RATU	0.5822	TERTINGGAL
213	NEGARA SAKTI	PAKUAN RATU	0.5773	TERTINGGAL
214	GUNUNG WARAS	PAKUAN RATU	0.5863	TERTINGGAL
215	PENENGAHAN	NEGERI AGUNG	0.5489	TERTINGGAL
216	KARYA AGUNG	NEGERI AGUNG	0.5298	TERTINGGAL
217	SUNSANG	NEGERI AGUNG	0.5576	TERTINGGAL
218	KOTA BARU	NEGERI AGUNG	0.5759	TERTINGGAL
219	WAY LIMAU	NEGERI AGUNG	0.5843	TERTINGGAL
220	KALIAWI	NEGERI BESAR	0.5408	TERTINGGAL
221	PAGAR IMAN	NEGERI BESAR	0.5690	TERTINGGAL

(Sumber Data : Kemendes, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia).

**Tabel. 2.9**  
 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun  
 Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
1	TANJUNG REJO	NEGERI AGUNG	0,8597	MANDIRI
2	NEGERI BARU	BLAMBANGAN UMPU	0.7767	MAJU
3	GUNUNG SANGKARAN	BLAMBANGAN UMPU	0.7073	MAJU
4	SETIA NEGARA	BARADATU	0.7081	MAJU
5	GUNUNG KATUN	BARADATU	0.7606	MAJU
6	BHAKTI NEGARA	BARADATU	0.7102	MAJU
7	MEKAR ASRI	BARADATU	0.7379	MAJU
8	TULANG BAWANG	BAHUGA	0,7170	MAJU
9	SERDANG KURING	BAHUGA	0,7213	MAJU
10	PAKUAN BARU	PAKUAN RATU	0.7360	MAJU
11	PAKUAN SAKTI	PAKUAN RATU	0.7205	MAJU
12	SERUPA INDAH	PAKUAN RATU	0.7078	MAJU
13	GEDUNG HARAPAN	NEGERI AGUNG	0.7132	MAJU
14	KALI PAPAN	NEGERI AGUNG	0.7343	MAJU
15	WAY TUBA	WAY TUBA	0.7490	MAJU
16	WAY TUBA ASRI	WAY TUBA	0,7205	MAJU
17	LEBAK PENIANGAN	REBANG TANGKAS	0,8005	MAJU
18	TANJUNG TIGA	REBANG TANGKAS	0,7246	MAJU
19	AIR RINGKIH	REBANG TANGKAS	0,7206	MAJU
20	GUNUNG SARI	REBANG TANGKAS	0,7117	MAJU
21	GUNUNG LABUHAN	GUNUNG LABUHAN	0,7354	MAJU
22	BUMI JAYA	NEGARA BATIN	0,7302	MAJU
23	ADI JAYA	NEGARA BATIN	0,7330	MAJU

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
24	TEGAL MUKTI	NEGERI BESAR	0,7395	MAJU
25	NEGERI JAYA	NEGERI BESAR	0,7541	MAJU
26	BUMI HARJO	BUAY BAHUGA	0,7203	MAJU
27	SUKA BUMI	BUAY BAHUGA	0,7186	MAJU
28	SUKA AGUNG	BUAY BAHUGA	0,7151	MAJU
29	PISANG BARU	BUMI AGUNG	0,7957	MAJU
30	BUMI AGUNG	BUMI AGUNG	0,7308	MAJU
31	RAMBANG JAYA	BLAMBANGAN UMPU	0.6587	BERKEMBANG
32	GISTANG	BLAMBANGAN UMPU	0.6308	BERKEMBANG
33	SIDOARJO	BLAMBANGAN UMPU	0.6517	BERKEMBANG
34	BUMI RATU	BLAMBANGAN UMPU	0.6802	BERKEMBANG
35	LEMBASUNG	BLAMBANGAN UMPU	0.6811	BERKEMBANG
36	UMPU BHAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.6465	BERKEMBANG
37	SANGKARAN BHAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.6330	BERKEMBANG
38	BUMI BARU	BLAMBANGAN UMPU	0.6359	BERKEMBANG
39	TANJUNG SARI	BLAMBANGAN UMPU	0.6402	BERKEMBANG
40	SRI REJEKI	BLAMBANGAN UMPU	0.6221	BERKEMBANG
41	KARANG UMPU	BLAMBANGAN UMPU	0.6079	BERKEMBANG
42	UMPU KENCANA	BLAMBANGAN UMPU	0.6444	BERKEMBANG
43	SRIWIJAYA	BLAMBANGAN UMPU	0.6875	BERKEMBANG
44	BRATA YUDHA	BLAMBANGAN UMPU	0.6875	BERKEMBANG
45	GEDUNG BATIN	BLAMBANGAN UMPU	0.6832	BERKEMBANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
46	NEGERI BUMI PUTRA	BLAMBANGAN UMPU	0.6743	BERKEMBANG
47	PANCA NEGERI	BLAMBANGAN UMPU	0.6830	BERKEMBANG
48	GEDUNG RIANG	BLAMBANGAN UMPU	0.6235	BERKEMBANG
49	OJO LALI	BLAMBANGAN UMPU	0.6125	BERKEMBANG
50	DATAR BANCONG	KASUI	0.6333	BERKEMBANG
51	KEDATON	KASUI	0.6292	BERKEMBANG
52	KARANG LANTANG	KASUI	0.6667	BERKEMBANG
53	KASUI LAMA	KASUI	0.6576	BERKEMBANG
54	KAMPUNG BARU	KASUI	0.6498	BERKEMBANG
55	JUKUH KEMUNING	KASUI	0.7071	BERKEMBANG
56	KOTA WAY	KASUI	0.6703	BERKEMBANG
57	TANJUNG KURUNG	KASUI	0.6229	BERKEMBANG
58	TALANG MANGGA	KASUI	0.6432	BERKEMBANG
59	TANJUNG HARAPAN	KASUI	0.6756	BERKEMBANG
60	SINAR GADING	KASUI	0.7017	BERKEMBANG
61	JAYA TINGGI	KASUI	0.6435	BERKEMBANG
62	SUKA JADI	KASUI	0.6663	BERKEMBANG
63	GELOMBANG PANJANG	KASUI	0.6629	BERKEMBANG
64	TANGKAS	KASUI	0.6103	BERKEMBANG
65	TANJUNG BULAN	KASUI	0.6383	BERKEMBANG
66	TANJUNGKURUNG LAMA	KASUI	0.6357	BERKEMBANG
67	BUKITBATU	KASUI	0.6322	BERKEMBANG
68	CAMPANG LAPAN	BANJIT	0.6141	BERKEMBANG
69	SUMBER BARU	BANJIT	0.6254	BERKEMBANG
70	RANTAU TEMIANG	BANJIT	0.6005	BERKEMBANG
71	JUKU BATU	BANJIT	0.6124	BERKEMBANG
72	BALI SADAR	BANJIT	0.6719	BERKEMBANG
73	DONO MULYO	BANJIT	0.6429	BERKEMBANG
74	BALI SADAR UTARA	BANJIT	0.7017	BERKEMBANG
75	BALI SADAR SELATAN	BANJIT	0.6784	BERKEMBANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
76	MENANGA JAYA	BANJIT	0.6179	BERKEMBANG
77	ARGO MULYO	BANJIT	0.6437	BERKEMBANG
78	RANTAU JAYA	BANJIT	0.6406	BERKEMBANG
79	REBANG TINGGI	BANJIT	0.6237	BERKEMBANG
80	SIMPANG ASAM	BANJIT	0.6186	BERKEMBANG
81	BANDAR AGUNG	BANJIT	0.6306	BERKEMBANG
82	KEMU	BANJIT	0.6140	BERKEMBANG
83	NEKI	BANJIT	0.6310	BERKEMBANG
84	SUMBER SARI	BANJIT	0.6290	BERKEMBANG
85	GEDUNG PAKUON	BARADATU	0.6719	BERKEMBANG
86	BUMI MERAPI	BARADATU	0.6438	BERKEMBANG
87	BANJAR SARI	BARADATU	0.6402	BERKEMBANG
88	BUMI REJO	BARADATU	0.6630	BERKEMBANG
89	SUKOSARI	BARADATU	0.6721	BERKEMBANG
90	BANJAR SETIA	BARADATU	0.6330	BERKEMBANG
91	GEDUNG REJO	BARADATU	0.6383	BERKEMBANG
92	BANJAR AGUNG	BARADATU	0.6249	BERKEMBANG
93	CUGAH	BARADATU	0.6438	BERKEMBANG
94	TIUH BALAK I	BARADATU	0.6906	BERKEMBANG
95	TIUH BALAK	BARADATU	0.6846	BERKEMBANG
96	BANJAR NEGARA	BARADATU	0.6663	BERKEMBANG
97	BANJAR MASIN	BARADATU	0.6306	BERKEMBANG
98	BANJAR MULYA	BARADATU	0,7056	BERKEMBANG
99	BANJAR BARU	BARADATU	0,6910	BERKEMBANG
100	MESIR ILIR	BAHUGA	0,6502	BERKEMBANG
101	SAPTO RENGGO	BAHUGA	0,6837	BERKEMBANG
102	GIRI HARJO	BAHUGA	0,6278	BERKEMBANG
103	BUMI AGUNG WATES	BAHUGA	0,6276	BERKEMBANG
104	BUMI AGUNG	BAHUGA	0,6094	BERKEMBANG
105	MEKAR JAYA	BAHUGA	0,6576	BERKEMBANG
106	PUTRA DEWA	BAHUGA	0,6149	BERKEMBANG
107	DEWA AGUNG	BAHUGA	0,6541	BERKEMBANG
108	TANJUNG RATU	PAKUAN RATU	0.6652	BERKEMBANG
109	PAKUAN RATU	PAKUAN RATU	0.6740	BERKEMBANG
110	RUMBIH	PAKUAN RATU	0.7052	BERKEMBANG
111	SUKABUMI	PAKUAN RATU	0.6981	BERKEMBANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
112	TANJUNG AGUNG	PAKUAN RATU	0.6814	BERKEMBANG
113	TANJUNG SERUPA	PAKUAN RATU	0.6495	BERKEMBANG
114	NEGARA HARJA	PAKUAN RATU	0.6870	BERKEMBANG
115	BAKTI NEGARA	PAKUAN RATU	0.6663	BERKEMBANG
116	NEGARA TAMA	PAKUAN RATU	0.6492	BERKEMBANG
117	WAY TAWAR	PAKUAN RATU	0.6516	BERKEMBANG
118	BUMI MULYA	PAKUAN RATU	0.6254	BERKEMBANG
119	NEGERI AGUNG	NEGERI AGUNG	0.6516	BERKEMBANG
120	BANDAR DALAM	NEGERI AGUNG	0.6317	BERKEMBANG
121	PULAU BATU	NEGERI AGUNG	0.6259	BERKEMBANG
122	KOTABUMI WAY KANAN	NEGERI AGUNG	0.6556	BERKEMBANG
123	GEDUNG MENENG	NEGERI AGUNG	0.6202	BERKEMBANG
124	MULYA SARI	NEGERI AGUNG	0.6441	BERKEMBANG
125	GEDUNG JAYA	NEGERI AGUNG	0.6344	BERKEMBANG
126	REJO SARI	NEGERI AGUNG	0.6535	BERKEMBANG
127	BANDAR KASIH	NEGERI AGUNG	0.6444	BERKEMBANG
128	SUMBER REJEKI	NEGERI AGUNG	0.6089	BERKEMBANG
129	MULYA AGUNG	NEGERI AGUNG	0.6181	BERKEMBANG
130	KARYA JAYA	WAY TUBA	0,6629	BERKEMBANG
131	SAY UMPU	WAY TUBA	0,6594	BERKEMBANG
132	BERINGIN JAYA	WAY TUBA	0,6657	BERKEMBANG
133	SUMA MUKTI	WAY TUBA	0,6689	BERKEMBANG
134	RAMSAI	WAY TUBA	0,6405	BERKEMBANG
135	BANDAR SARI	WAY TUBA	0,6775	BERKEMBANG
136	BUMI DANA	WAY TUBA	0,6500	BERKEMBANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
137	BUKIT GEMURUH	WAY TUBA	0,6094	BERKEMBANG
138	WAY MENCAR	WAY TUBA	0,6725	BERKEMBANG
139	WAY PISANG	WAY TUBA	0,6625	BERKEMBANG
140	BUKIT HARAPAN	WAY TUBA	0,6129	BERKEMBANG
141	MADANG JAYA	REBANG TANGKAS	0,6757	BERKEMBANG
142	SIMPANG TIGA	REBANG TANGKAS	0,6979	BERKEMBANG
143	TANJUNG RAYA	REBANG TANGKAS	0.6903	BERKEMBANG
144	BERINGIN JAYA	REBANG TANGKAS	0,6637	BERKEMBANG
145	KARYA MAJU	REBANG TANGKAS	0,6571	BERKEMBANG
146	MULYA JAYA	REBANG TANGKAS	0,6500	BERKEMBANG
147	GUNUNG BARU	GUNUNG LABUHAN	0.6405	BERKEMBANG
148	BANJAR SAKTI	GUNUNG LABUHAN	0.6332	BERKEMBANG
149	SUKA NEGERI	GUNUNG LABUHAN	0.6216	BERKEMBANG
150	NEGERI MULYO	GUNUNG LABUHAN	0.6421	BERKEMBANG
151	NEGERI SUNGKAI	GUNUNG LABUHAN	0.6697	BERKEMBANG
152	GUNUNG SARI	GUNUNG LABUHAN	0.6606	BERKEMBANG
153	WAY TUBA	GUNUNG LABUHAN	0.6660	BERKEMBANG
154	BENGKULU	GUNUNG LABUHAN	0.6851	BERKEMBANG
155	BENGKULU REJO	GUNUNG LABUHAN	0.6678	BERKEMBANG
156	KAYU BATU	GUNUNG LABUHAN	0.6643	BERKEMBANG
157	BENGKULU RAMAN	GUNUNG LABUHAN	0.6271	BERKEMBANG
158	BENGKULU JAYA	GUNUNG LABUHAN	0.6400	BERKEMBANG
159	TIUH BALAK II	GUNUNG LABUHAN	0.6497	BERKEMBANG



<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
160	CURUP PATAH	GUNUNG LABUHAN	0.6570	BERKEMBANG
161	SUKARAME	GUNUNG LABUHAN	0.6646	BERKEMBANG
162	BANJAR RATU	GUNUNG LABUHAN	0.6363	BERKEMBANG
163	NEGERI UJAN MAS	GUNUNG LABUHAN	0.6594	BERKEMBANG
164	BENGKULU TENGAH	GUNUNG LABUHAN	0.6292	BERKEMBANG
165	GUNUNG PEKUWON	GUNUNG LABUHAN	0.6459	BERKEMBANG
166	LABUHAN JAYA	GUNUNG LABUHAN	0.6363	BERKEMBANG
167	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	0,6225	BERKEMBANG
168	PURWA AGUNG	NEGARA BATIN	0,6870	BERKEMBANG
169	PURWA NEGARA	NEGARA BATIN	0,6384	BERKEMBANG
170	SETIA NEGARA	NEGARA BATIN	0,6510	BERKEMBANG
171	SRI MULYO	NEGARA BATIN	0,6565	BERKEMBANG
172	SRI MENANTI	NEGARA BATIN	0,6910	BERKEMBANG
173	KARTA JAYA	NEGARA BATIN	0,6460	BERKEMBANG
174	GISTING JAYA	NEGARA BATIN	0,6798	BERKEMBANG
175	MARGA JAYA	NEGARA BATIN	0,6252	BERKEMBANG
176	GEDUNG JAYA	NEGARA BATIN	0,6522	BERKEMBANG
177	SARI JAYA	NEGARA BATIN	0,6700	BERKEMBANG
178	NEGARA MULYA	NEGARA BATIN	0,6319	BERKEMBANG
179	KOTA JAWA	NEGARA BATIN	0,6573	BERKEMBANG
180	NEGERI BESAR	NEGERI BESAR	0,6103	BERKEMBANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IDM</b>	<b>STATUS</b>
181	KILING-KILING	NEGERI BESAR	0,6249	BERKEMBANG
182	TIUH BARU	NEGERI BESAR	0,6198	BERKEMBANG
183	BIMA SAKTI	NEGERI BESAR	0,6779	BERKEMBANG
184	NEGARA JAYA	NEGERI BESAR	0,6832	BERKEMBANG
185	SRI BASUKI	NEGERI BESAR	0,7041	BERKEMBANG
186	KALIWI INDAH	NEGERI BESAR	0,6571	BERKEMBANG
187	TANJUNG MAS	NEGERI BESAR	0,6644	BERKEMBANG
188	NEGERI KASIH	NEGERI BESAR	0,6121	BERKEMBANG
189	PUNJUL AGUNG	BUAY BAHUGA	0,6663	BERKEMBANG
190	SRI TUNGGAL	BUAY BAHUGA	0,6716	BERKEMBANG
191	SUKADANA	BUAY BAHUGA	0,6562	BERKEMBANG
192	NUAR MAJU	BUAY BAHUGA	0,6849	BERKEMBANG
193	LEBUNG LAWE	BUAY BAHUGA	0,6313	BERKEMBANG
194	WAY AGUNG	BUAY BAHUGA	0,6481	BERKEMBANG
195	PISANG INDAH	BUMI AGUNG	0,6432	BERKEMBANG
196	SRI NUMPI	BUMI AGUNG	0,6389	BERKEMBANG
197	MULYO HARJO	BUMI AGUNG	0,6570	BERKEMBANG
198	KARANGAN	BUMI AGUNG	0,6017	BERKEMBANG
199	WONO HARJO	BUMI AGUNG	0,6995	BERKEMBANG
200	SUKA MAJU	BUMI AGUNG	0,7000	BERKEMBANG
201	TANJUNG DALOM	BUMI AGUNG	0,6390	BERKEMBANG
202	BUMI SAY AGUNG	BUMI AGUNG	0,6232	BERKEMBANG
203	NEGERI BATIN	BLAMBANGAN UMPU	0.5883	TERTINGGAL
204	TANJUNG RAJA GIHAM	BLAMBANGAN UMPU	0.5540	TERTINGGAL
205	SEGARA MIDER	BLAMBANGAN UMPU	0.5298	TERTINGGAL

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
206	TANJUNG RAJA SAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.5781	TERTINGGAL
207	BUNGLAI	BANJIT	0.5933	TERTINGGAL
208	MENANGA SIAMANG	BANJIT	0.5905	TERTINGGAL
209	MESIR UDIK	BAHUGA	0,5833	TERTINGGAL
210	KARANG AGUNG	PAKUAN RATU	0.5222	TERTINGGAL
211	GUNUNG CAHYA	PAKUAN RATU	0.5583	TERTINGGAL
212	NEGARA RATU	PAKUAN RATU	0.5921	TERTINGGAL
213	NEGARA SAKTI	PAKUAN RATU	0.5754	TERTINGGAL
214	GUNUNG WARAS	PAKUAN RATU	0.5921	TERTINGGAL
215	PENENGAHAN	NEGERI AGUNG	0.5600	TERTINGGAL
216	KARYA AGUNG	NEGERI AGUNG	0.5298	TERTINGGAL
217	SUNSANG	NEGERI AGUNG	0.5924	TERTINGGAL
218	KOTA BARU	NEGERI AGUNG	0.5759	TERTINGGAL
219	WAY LIMAU	NEGERI AGUNG	0.5173	TERTINGGAL
220	KALIWI	NEGERI BESAR	0,5408	TERTINGGAL
221	PAGAR IMAN	NEGERI BESAR	0,5975	TERTINGGAL

(Sumber Data : Kemendes, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia).

**Tabel. 2.10**  
 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun  
 Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
1	PISANG BARU	BUMI AGUNG	0.8716	MANDIRI
2	TANJUNG REJO	NEGERI AGUNG	0.8692	MANDIRI
3	GUNUNG KATUN	BARADATU	0.8668	MANDIRI
4	BHAKTI NEGARA	BARADATU	0.8473	MANDIRI
5	SERUPA INDAH	PAKUAN RATU	0.8432	MANDIRI

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
6	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	0.8386	MANDIRI
7	SETIA NEGARA	BARADATU	0.8268	MANDIRI
8	BUMI BARU	BLAMBANGAN UMPU	0.8251	MANDIRI
9	LEBAK PENIANGAN	REBANG TANGKAS	0.8248	MANDIRI
10	GUNUNG SARI	REBANG TANGKAS	0.8216	MANDIRI
11	NEGERI BARU	UMPU SEMENGIK	0.7624	MAJU
12	BUMI RATU	UMPU SEMENGIK	0.7806	MAJU
13	GUNUNG SANGKARAN	BLAMBANGAN UMPU	0.7352	MAJU
14	TULANG BAWANG	BAHUGA	0.7392	MAJU
15	BUMI AGUNG	BAHUGA	0.7525	MAJU
16	SERDANG KURING	BAHUGA	0.7617	MAJU
17	PAKUAN RATU	PAKUAN RATU	0.7914	MAJU
18	PAKUAN BARU	PAKUAN RATU	0.7992	MAJU
19	PAKUAN SAKTI	PAKUAN RATU	0.7357	MAJU
20	RUMBIH	PAKUAN RATU	0.7892	MAJU
21	NEGARA RATU	PAKUAN RATU	0.7389	MAJU
22	NEGARA SAKTI	PAKUAN RATU	0.7162	MAJU
23	SUKABUMI	PAKUAN RATU	0.8008	MAJU
24	TANJUNG AGUNG	PAKUAN RATU	0.7151	MAJU
25	TANJUNG SERUPA	PAKUAN RATU	0.7943	MAJU
26	NEGARA HARJA	PAKUAN RATU	0.7854	MAJU
27	NEGARA TAMA	PAKUAN RATU	0.7481	MAJU
28	NEGERI AGUNG	NEGERI AGUNG	0.736	MAJU
29	GEDUNG HARAPAN	NEGERI AGUNG	0.7132	MAJU
30	KALI PAPAN	NEGERI AGUNG	0.7419	MAJU
31	WAY TUBA	WAY TUBA	0.7713	MAJU
32	WAY TUBA ASRI	WAY TUBA	0.7786	MAJU
33	BANDAR SARI	WAY TUBA	0.7441	MAJU
34	TANJUNG TIGA	REBANG TANGKAS	0.7302	MAJU
35	AIR RINGKIH	REBANG TANGKAS	0.7262	MAJU
36	TANJUNG RAYA	REBANG TANGKAS	0.7608	MAJU
37	BERINGIN JAYA	REBANG TANGKAS	0.711	MAJU

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
38	GUNUNG LABUHAN	GUNUNG LABUHAN	0.7733	MAJU
39	WAY TUBA	GUNUNG LABUHAN	0.7638	MAJU
40	BUMI JAYA	NEGARA BATIN	0.7378	MAJU
41	ADI JAYA	NEGARA BATIN	0,7330	MAJU
42	PURWA AGUNG	NEGARA BATIN	0.7946	MAJU
43	PURWA NEGARA	NEGARA BATIN	0.7408	MAJU
44	GISTING JAYA	NEGARA BATIN	0.7135	MAJU
45	TEGAL MUKTI	NEGERI BESAR	0.7256	MAJU
46	NEGERI JAYA	NEGERI BESAR	0.7468	MAJU
47	BIMA SAKTI	NEGERI BESAR	0.7184	MAJU
48	KALIAWI INDAH	NEGERI BESAR	0.7349	MAJU
49	BUMI HARJO	BUAY BAHUGA	0.7167	MAJU
50	SUKA BUMI	BUAY BAHUGA	0.7373	MAJU
51	SUKA AGUNG	BUAY BAHUGA	0.7373	MAJU
52	PUNJUL AGUNG	BUAY BAHUGA	0.7129	MAJU
53	NUAR MAJU	BUAY BAHUGA	0.7183	MAJU
54	BUMI AGUNG	BUMI AGUNG	0.7717	MAJU
55	WONO HARJO	BUMI AGUNG	0.7076	MAJU
56	SUKA MAJU	BUMI AGUNG	0.7225	MAJU
57	SINAR GADING	KASUI	0.7092	MAJU
58	JAYA TINGGI	KASUI	0.7738	MAJU
59	ARGO MULYO	BANJIT	0.756	MAJU
60	BANJAR SARI	BARADATU	0.7367	MAJU
61	GEDUNG REJO	BARADATU	0.7779	MAJU
62	TIUH BALAK I	BARADATU	0.7948	MAJU
63	TIUH BALAK	BARADATU	0.7735	MAJU
64	MEKAR ASRI	BARADATU	0.736	MAJU
65	RAMBANG JAYA	UMPU SEMENGIK	0.6625	BERKEMBANG
66	GISTANG	UMPU SEMENGIK	0.653	BERKEMBANG
67	SIDOARJO	UMPU SEMENGIK	0.6722	BERKEMBANG
68	NEGERI BATIN	UMPU SEMENGIK	0.6533	BERKEMBANG
69	SRIWIJAYA	UMPU SEMENGIK	0.6608	BERKEMBANG
70	BRATA YUDHA	UMPU SEMENGIK	0.6951	BERKEMBANG

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
71	GEDUNG BATIN	UMPU SEMENGIK	0.687	BERKEMBANG
72	NEGERI BUMI PUTRA	UMPU SEMENGIK	0.6984	BERKEMBANG
73	PANCA NEGERI	UMPU SEMENGIK	0.7016	BERKEMBANG
74	GEDUNG RIANG	UMPU SEMENGIK	0.6387	BERKEMBANG
75	OJO LALI	UMPU SEMENGIK	0.6202	BERKEMBANG
76	LEMBASUNG	BLAMBANGAN UMPU	0.6922	BERKEMBANG
77	UMPU BHAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.6989	BERKEMBANG
78	SANGKARAN BHAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.646	BERKEMBANG
79	TANJUNG SARI	BLAMBANGAN UMPU	0.6402	BERKEMBANG
80	SRI REJEKI	BLAMBANGAN UMPU	0.6554	BERKEMBANG
81	KARANG UMPU	BLAMBANGAN UMPU	0.7038	BERKEMBANG
82	UMPU KENCANA	BLAMBANGAN UMPU	0.6444	BERKEMBANG
83	TANJUNG RAJA SAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.6257	BERKEMBANG
84	TANJUNG RAJA GIHAM	BLAMBANGAN UMPU	0.6783	BERKEMBANG
85	SEGARA MIDER	BLAMBANGAN UMPU	0.6775	BERKEMBANG
86	DATAR BANCONG	KASUI	0.6333	BERKEMBANG
87	KEDATON	KASUI	0.6475	BERKEMBANG
88	KARANG LANTANG	KASUI	0.6833	BERKEMBANG
89	KASUI LAMA	KASUI	0.691	BERKEMBANG
90	KAMPUNG BARU	KASUI	0.6276	BERKEMBANG
91	JUKUH KEMUNING	KASUI	0.6771	BERKEMBANG
92	KOTA WAY	KASUI	0.6925	BERKEMBANG
93	TANJUNG KURUNG	KASUI	0.6697	BERKEMBANG
94	TALANG MANGGA	KASUI	0.6711	BERKEMBANG
95	TANJUNG HARAPAN	KASUI	0.6756	BERKEMBANG
96	SUKA JADI	KASUI	0.6867	BERKEMBANG
97	GELOMBANG PANJANG	KASUI	0.6629	BERKEMBANG

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
98	TANGKAS	KASUI	0.6235	BERKEMBANG
99	TANJUNG BULAN	KASUI	0.6383	BERKEMBANG
100	TANJUNGGURUNG LAMA	KASUI	0.6637	BERKEMBANG
101	BUKITBATU	KASUI	0.6297	BERKEMBANG
102	CAMPANG LAPAN	BANJIT	0.6419	BERKEMBANG
103	SUMBER BARU	BANJIT	0.6359	BERKEMBANG
104	RANTAU TEMIANG	BANJIT	0.6211	BERKEMBANG
105	JUKU BATU	BANJIT	0.6181	BERKEMBANG
106	BALI SADAR	BANJIT	0.6795	BERKEMBANG
107	DONO MULYO	BANJIT	0.663	BERKEMBANG
108	BALI SADAR UTARA	BANJIT	0.7017	BERKEMBANG
109	BALI SADAR SELATAN	BANJIT	0.686	BERKEMBANG
110	MENANGA JAYA	BANJIT	0.6219	BERKEMBANG
111	BUNGLAI	BANJIT	0.6402	BERKEMBANG
112	RANTAU JAYA	BANJIT	0.6351	BERKEMBANG
113	REBANG TINGGI	BANJIT	0.6922	BERKEMBANG
114	SIMPANG ASAM	BANJIT	0.651	BERKEMBANG
115	BANDAR AGUNG	BANJIT	0.6533	BERKEMBANG
116	KEMU	BANJIT	0.6584	BERKEMBANG
117	NEKI	BANJIT	0.6551	BERKEMBANG
118	SUMBER SARI	BANJIT	0.6105	BERKEMBANG
119	MENANGA SIAMANG	BANJIT	0.6846	BERKEMBANG
120	GEDUNG PAKUON	BARADATU	0.6941	BERKEMBANG
121	BUMI MERAPI	BARADATU	0.6438	BERKEMBANG
122	BUMI REJO	BARADATU	0.6630	BERKEMBANG
123	SUKOSARI	BARADATU	0.6854	BERKEMBANG
124	BANJAR SETIA	BARADATU	0.6406	BERKEMBANG
125	BANJAR AGUNG	BARADATU	0.6551	BERKEMBANG
126	CUGAH	BARADATU	0.6514	BERKEMBANG
127	BANJAR NEGARA	BARADATU	0.6663	BERKEMBANG
128	BANJAR MASIN	BARADATU	0.6306	BERKEMBANG
129	BANJAR MULYA	BARADATU	0,7056	BERKEMBANG
130	BANJAR BARU	BARADATU	0.7005	BERKEMBANG
131	MESIR ILIR	BAHUGA	0,6502	BERKEMBANG
132	SAPTO RENGGO	BAHUGA	0.7	BERKEMBANG
133	GIRI HARJO	BAHUGA	0.6503	BERKEMBANG
134	BUMI AGUNG WATES	BAHUGA	0.617	BERKEMBANG
135	MEKAR JAYA	BAHUGA	0.6944	BERKEMBANG
136	KOTA DEWA	BAHUGA	0.6521	BERKEMBANG
137	MESIR UDIK	BAHUGA	0.6132	BERKEMBANG
138	DEWA AGUNG	BAHUGA	0.6895	BERKEMBANG

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
139	TANJUNG RATU	PAKUAN RATU	0.6652	BERKEMBANG
140	BAKTI NEGARA	PAKUAN RATU	0.683	BERKEMBANG
141	WAY TAWAR	PAKUAN RATU	0.6759	BERKEMBANG
142	GUNUNG WARAS	PAKUAN RATU	0.6143	BERKEMBANG
143	BUMI MULYA	PAKUAN RATU	0.6684	BERKEMBANG
144	KARANG AGUNG	PAKUAN RATU	0.6395	BERKEMBANG
145	BANDAR DALAM	NEGERI AGUNG	0.654	BERKEMBANG
146	PULAU BATU	NEGERI AGUNG	0.639	BERKEMBANG
147	KOTABUMI WAY KANAN	NEGERI AGUNG	0.693	BERKEMBANG
148	GEDUNG MENENG	NEGERI AGUNG	0.68	BERKEMBANG
149	MULYA SARI	NEGERI AGUNG	0.6663	BERKEMBANG
150	GEDUNG JAYA	NEGERI AGUNG	0.6517	BERKEMBANG
151	REJO SARI	NEGERI AGUNG	0.6611	BERKEMBANG
152	BANDAR KASIH	NEGERI AGUNG	0.6521	BERKEMBANG
153	SUMBER REJEKI	NEGERI AGUNG	0.6276	BERKEMBANG
154	MULYA AGUNG	NEGERI AGUNG	0.6444	BERKEMBANG
155	PENENGAHAN	NEGERI AGUNG	0.6717	BERKEMBANG
156	KARYA AGUNG	NEGERI AGUNG	0.6657	BERKEMBANG
157	SUNSANG	NEGERI AGUNG	0.6813	BERKEMBANG
158	KOTA BARU	NEGERI AGUNG	0.6133	BERKEMBANG
159	KARYA JAYA	WAY TUBA	0,6629	BERKEMBANG
160	SAY UMPU	WAY TUBA	0.6894	BERKEMBANG
161	BERINGIN JAYA	WAY TUBA	0,6657	BERKEMBANG
162	SUMA MUKTI	WAY TUBA	0.6703	BERKEMBANG
163	RAMSAI	WAY TUBA	0.674	BERKEMBANG
164	BUMI DANA	WAY TUBA	0.6798	BERKEMBANG
165	BUKIT GEMURUH	WAY TUBA	0.6149	BERKEMBANG
166	WAY MENCAR	WAY TUBA	0.6762	BERKEMBANG
167	WAY PISANG	WAY TUBA	0.6798	BERKEMBANG
168	BUKIT HARAPAN	WAY TUBA	0.6167	BERKEMBANG
169	MADANG JAYA	REBANG TANGKAS	0.6983	BERKEMBANG
170	SIMPANG TIGA	REBANG TANGKAS	0.7035	BERKEMBANG
171	KARYA MAJU	REBANG TANGKAS	0.6738	BERKEMBANG
172	MULYA JAYA	REBANG TANGKAS	0.6698	BERKEMBANG
173	GUNUNG BARU	GUNUNG LABUHAN	0.6724	BERKEMBANG



NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
174	BANJAR SAKTI	GUNUNG LABUHAN	0.6125	BERKEMBANG
175	SUKA NEGERI	GUNUNG LABUHAN	0.6819	BERKEMBANG
176	NEGERI MULYO	GUNUNG LABUHAN	0.6421	BERKEMBANG
177	NEGERI SINGKAI	GUNUNG LABUHAN	0.6905	BERKEMBANG
178	GUNUNG SARI	GUNUNG LABUHAN	0.6721	BERKEMBANG
179	BENGKULU	GUNUNG LABUHAN	0.6927	BERKEMBANG
180	BENGKULU REJO	GUNUNG LABUHAN	0.6716	BERKEMBANG
181	KAYU BATU	GUNUNG LABUHAN	0.6662	BERKEMBANG
182	BENGKULU RAMAN	GUNUNG LABUHAN	0.631	BERKEMBANG
183	BENGKULU JAYA	GUNUNG LABUHAN	0.6606	BERKEMBANG
184	TIUH BALAK II	GUNUNG LABUHAN	0.6497	BERKEMBANG
185	CURUP PATAH	GUNUNG LABUHAN	0.6721	BERKEMBANG
186	SUKARAME	GUNUNG LABUHAN	0.6868	BERKEMBANG
187	BANJAR RATU	GUNUNG LABUHAN	0.6686	BERKEMBANG
188	NEGERI UJAN MAS	GUNUNG LABUHAN	0.6952	BERKEMBANG
189	BENGKULU TENGAH	GUNUNG LABUHAN	0.6905	BERKEMBANG
190	GUNUNGPEKUWON	GUNUNG LABUHAN	0.6833	BERKEMBANG
191	LABUHAN JAYA	GUNUNG LABUHAN	0.6381	BERKEMBANG
192	SETIA NEGARA	NEGARA BATIN	0.6905	BERKEMBANG
193	SRI MULYO	NEGARA BATIN	0.6646	BERKEMBANG
194	SRI MENANTI	NEGARA BATIN	0.6484	BERKEMBANG
195	KARTA JAYA	NEGARA BATIN	0.6459	BERKEMBANG
196	MARGA JAYA	NEGARA BATIN	0,6252	BERKEMBANG
197	GEDUNG JAYA	NEGARA BATIN	0.684	BERKEMBANG
198	SARI JAYA	NEGARA BATIN	0.6811	BERKEMBANG

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
199	NEGARA MULYA	NEGARA BATIN	0.6914	BERKEMBANG
200	KOTA JAWA	NEGARA BATIN	0.6852	BERKEMBANG
201	NEGERI BESAR	NEGERI BESAR	0.6716	BERKEMBANG
202	KILING-KILING	NEGERI BESAR	0.6471	BERKEMBANG
203	TIUH BARU	NEGERI BESAR	0.6719	BERKEMBANG
204	NEGARA JAYA	NEGERI BESAR	0.659	BERKEMBANG
205	SRI BASUKI	NEGERI BESAR	0.6987	BERKEMBANG
206	TANJUNG MAS	NEGERI BESAR	0.6365	BERKEMBANG
207	NEGERI KASIH	NEGERI BESAR	0.6363	BERKEMBANG
208	KALIAWI	NEGERI BESAR	0.6748	BERKEMBANG
209	PAGAR IMAN	NEGERI BESAR	0.5994	BERKEMBANG
210	SRI TUNGGAL	BUAY BAHUGA	0.7021	BERKEMBANG
211	SUKADANA	BUAY BAHUGA	0.6784	BERKEMBANG
212	LEBUNG LAWE	BUAY BAHUGA	0.6929	BERKEMBANG
213	WAY AGUNG	BUAY BAHUGA	0.6837	BERKEMBANG
214	PISANG INDAH	BUMI AGUNG	0.6635	BERKEMBANG
215	SRI NUMPI	BUMI AGUNG	0.7056	BERKEMBANG
216	MULYO HARJO	BUMI AGUNG	0.6684	BERKEMBANG
217	KARANGAN	BUMI AGUNG	0.6357	BERKEMBANG
218	TANJUNG DALOM	BUMI AGUNG	0.6502	BERKEMBANG
219	BUMI SAY AGUNG	BUMI AGUNG	0.6384	BERKEMBANG
220	WAY LIMAU	NEGERI AGUNG	0.536	TERTINGGAL
221	GUNUNG CAHYA	PAKUAN RATU	0.5897	TERTINGGAL

(Sumber Data : Kemendes, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia).

**Tabel. 2.11**

Status IDM Kecamatan Berdasarkan Rata-Rata Indeks Desa  
Membangun (IDM) Kabupaten Way Kanan Tahun 2018

No	Kecamatan	Status	Nilai IDM
1	Bl. Umpu	Tertinggal	0,5167
2	Kasui	Sangat Tertinggal	0,3187
3	Banjit	Tertinggal	0,5737
4	Baradatu	Sangat Tertinggal	0,3225
5	Pakuan Ratu	Tertinggal	0,5929
6	Gunung Labuhan	Berkembang	0,6101
7	Negeri Agung	Tertinggal	0,5710

8	Way Tuba	Berkembang	0,6202
9	Rebang Tangkas	Berkembang	0,6331
10	Negara Batin	Tertinggal	0,5904
11	Negeri Besar	Sangat Tertinggal	0,3983
12	Buay Bahuga	Berkembang	0,6521
13	Bumi Agung	Berkembang	0,6190
14	Bahuga	Tertinggal	0,5666

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan).

**Tabel. 2.12**

Status IDM Kecamatan Berdasarkan Rata-Rata Indeks Desa  
Membangun (IDM) Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

No	Kecamatan	Status	Nilai IDM
1	Bl. Umpu	Berkembang	0,6060
2	Kasui	Tertinggal	0,5756
3	Banjit	Tertinggal	0,5849
4	Baradatu	Berkembang	0,6245
5	Pakuan Ratu	Tertinggal	0,5965
6	Gunung Labuhan	Berkembang	0,6295
7	Negeri Agung	Tertinggal	0,5753
8	Way Tuba	Berkembang	0,6490
9	Rebang Tangkas	Berkembang	0,6206
10	Negara Batin	Berkembang	0,6260
11	Negeri Besar	Berkembang	0,6144
12	Buay Bahuga	Berkembang	0,6373
13	Bumi Agung	Berkembang	0,6216
14	Bahuga	Tertinggal	0,5903

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan).

**Tabel. 2.13**

Status IDM Kecamatan Berdasarkan Rata-Rata Indeks Desa  
Membangun (IDM) Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Status</b>	<b>Nilai IDM</b>
1	Bl. Umpu	Berkembang	0,6384
2	Kasui	Berkembang	0,6493
3	Banjit	Berkembang	0,6201
4	Baradatu	Berkembang	0,6737
5	Pakuan Ratu	Berkembang	0,6397
6	Gunung Labuhan	Berkembang	0,6509
7	Negeri Agung	Berkembang	0,6275
8	Way Tuba	Berkembang	0,6531
9	Rebang Tangkas	Berkembang	0,6830
10	Negara Batin	Berkembang	0,6620
11	Negeri Besar	Berkembang	0,6480
12	Buay Bahuga	Berkembang	0,6718
13	Bumi Agung	Berkembang	0,6647
14	Bahuga	Berkembang	0,6414

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan).

**Tabel. 2.14**

Status IDM Kecamatan Berdasarkan Rata-Rata Indeks Desa  
Membangun (IDM) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Status</b>	<b>Nilai IDM</b>
1	Bl. Umpu	Berkembang	0,6447
2	Kasui	Berkembang	0,6525
3	Banjit	Berkembang	0,6305
4	Baradatu	Berkembang	0,6745
5	Pakuan Ratu	Berkembang	0,6503
6	Gunung Labuhan	Berkembang	0,6538

7	Negeri Agung	Berkembang	0,6353
8	Way Tuba	Berkembang	0,6655
9	Negara Batin	Berkembang	0,6648
10	Negeri Besar	Berkembang	0,6527
11	Buay Bahuga	Berkembang	0,6791
12	Bumi Agung	Berkembang	0,6729
13	Bahuga	Berkembang	0,6497
14	Rebang Tangkas	Tertinggal	0,5501

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan).

**Tabel. 2.15**

Status IDM Kecamatan Berdasarkan Rata-Rata Indeks Desa  
Membangun (IDM) Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No	Kecamatan	Status	Nilai IDM
1	Bl. Umpu	Berkembang	0,6852
2	Kasui	Berkembang	0,6698
3	Banjit	Berkembang	0,6581
4	Baradatu	Maju	0,7208
5	Pakuan Ratu	Berkembang	0,6839
6	Gunung Labuhan	Berkembang	0,6769
7	Negeri Agung	Berkembang	0,6735
8	Way Tuba	Berkembang	0,6864
9	Negara Batin	Berkembang	0,7049
10	Negeri Besar	Berkembang	0,6785
11	Buay Bahuga	Berkembang	0,7088
12	Bumi Agung	Berkembang	0,7035
13	Bahuga	Berkembang	0,6836
14	Rebang Tangkas	Maju	0,7320
15	Umpu Semenguk	Berkembang	0,6835

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan).

**Tabel 2.16**

Status IDM Kabupaten Berdasarkan Jumlah Status IDM Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Way Kanan

No	Tahun	Status	Nilai IDM
1	2018	Tertinggal	0,4764
2	2019	Berkembang	0,6108
3	2020	Berkembang	0,6517
4	2021	Berkembang	0,6483
5	2022	Berkembang	0,6899

**Tabel 2.17**

Jumlah Lembaga Organisasi Masyarakat Kampung Tahun 2021

No	Jumlah Lembaga Organisasi	Tahun 2022
1	Badan Perwakilan Kampung (BPK)	221
2	PKK	243
3	Posyandu	433
4	BUM Des	152

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. WK)

Secara menyeluruh kinerja pelayanan yang dilaksanakan berupa peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan lembaga dan usaha ekonomi kampung, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dan upaya-upaya lainnya dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat dan kampung yang mandiri telah berjalan dan mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Mengaktifkan kembali Lembaga-lembaga kemasyarakatan, meningkatkan usaha perekonomian kampung, dan memberikan pemahaman terkait manajemen tata kelola pemerintah kampung merupakan usaha yang terus dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman baik dari segi tata kelola maupun regulasi yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan.

Masyarakat adalah pelaku dari pembangunan kampung, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena upaya untuk mengaktifkan kembali lembaga kemasyarakatan, Lembaga usaha ekonomi masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik semua bermula pada tingkat pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat. Sulitnya membangkitkan semangat masyarakat untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik, kurangnya keberlanjutan atas peran aktif dan keaktifan dari lembaga kemasyarakatan bisa saja akan menjadi salah satu faktor penurunan atas pencapaian kinerja. Hal lain juga bias disebabkan jika Lembaga masyarakat yang ada tidak diposisikan sebagai lembaga yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan publik, tidak adanya kerjasama antara pemerintah kampung dengan lembaga, tidak adanya regulasi yang kuat untuk mengatur atau mengikat para kader jika tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya segala pencapaian tersebut diatas, apabila tidak dilakukan secara berkelanjutan baik itu pemberian pembinaan maupun pelatihan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat maka usaha untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri akan semakin jauh. Alokasi anggaran kinerja pelayanan dan realisasi serapan anggaran serta pertumbuhan anggaran setiap periode diuraikan dalam tabel 2.16 berikut ini:

**Tabel 2.18**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan**

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>I</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	6.738.878.2	9.068.331.608	6.705.863.435	6.348.836.387	3.928.350.285	5.863.426.850	8.347.723.202	6.258.458.590	5.901.243.413	3.649.908.583	87.01%	92.05%	93.33%	92.95%	92.91%	6.558.052.079	6.004.152.128
<b>II</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.948.125.722	2.214.901.108	2.143.736.735	2.185.894.687	2.242.962.900	1.912.065.830	2.096.625.952	2.004.940.843	2.041.777.022	2.112.568.386	98.15%	94.66%	93.53%	93.41%	94.19%	2.147.124.230	2.033.595.607
<b>III</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.790.752.960	6.853.430.500	4.562.126.700	4.162.941.700	1.685.387.385	3.951.361.020	6.251.097.250	4.253.517.747	3.859.466.391	1.537.340.197	82.48%	91.21%	93.24%	92.71%	91.22%	4.410.927.849	3.970.556.521
	- <b>BELANJA PEGAWAI</b>	35.150.000	34.800.000	49.320.000	55.920.000	392.850.000	35.150.000	43.170.000	49.320.000	55.920.000	392.850.000							
	- <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4.360.302.960	6.811.630.500	4.448.056.700	4.041.618.800	1.292.537.385	3.536.915.020	6.202.302.250	4.141.979.747	3.738.320.591	1,144.490.197							
	- <b>BELANJA MODAL</b>	395.300.000	7.000.000	64,750.000	65.402.900	-	379.296.000	5.625.000	62.218.000	65.225.800	-							



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMK**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai urusan wajib dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat dan kampung. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa tantangan dan peluang dari macam-macam faktor mempengaruhi yaitu:

1. Tantangan Pelayanan Perangkat Daerah Yang Mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung:
  - a. Kurangnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif.
  - b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam partisipasi pembangunan.
  - c. Belum kuatnya komitmen dari aparat kampung dalam memberikan layanan yang prima.
2. Peluang yang bisa mempengaruhi kinerja pelayanan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung:
  - a. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan pemerataan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi masyarakat, fasilitasi pelatihan, perencanaan pembangunan yang partisipatif kepada LPMK dan Kader Pemberdayaan Masyarakat di pekampungan, fasilitasi penyusunan data profil kampung.
  - b. Adanya komitmen dari pengambil kebijakan dalam peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
  - c. Sarana dan Prasarana yang memadai.
  - d. Tingginya respon perempuan dalam berorganisasi dan aktif di PKK.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMK**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau kesenjangan antara yang ideal dan yang belum ideal yang kemudian akan diintervensi melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah, sedangkan Isu Strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan/dikedepankan atau suatu permasalahan yang strategis yang akan diintervensi melalui tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah. Permasalahan pembangunan biasanya timbul dari kekuatan (potensi) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman yang belum dapat diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renstra perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar renstra yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Dengan identifikasi permasalahan diharapkan pula diketahui berbagai faktor yang mempengaruhi

keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dilihat dari aspek beban kerja tidak dapat terlepas dengan aspek kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung harus mampu menjabarkan terhadap tugas pokok sebagai fungsi pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan kampung. Untuk itu kemampuan aparatur harus selalu ditingkatkan guna pencapaian pelayanan yang baik didasarkan pada mekanisme yang ada. Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan Program dan Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung namun dalam pelaksanaan capaian kinerja masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut secara umum disampaikan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar masalah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Nilai IDM Kabupaten Way Kanan masih rendah.	1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat kampung dalam pembangunan.	1. Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
2	Masih terdapat 9,50% kampung tertinggal.	2. Kurangnya kapasitas aparatur pemerintah	Sistem pendataan profil kampung/ kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan.	pembangunan di kampung/ kelurahan belum optimal.
3	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat rendah. Hal ini mengindikasikan lunturnya nilai-nilai kegotongroyongan, sehingga potensial menimbulkan permasalahan lebih lanjut dalam menghadapi tuntutan kampung mandiri.	3. Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna di pekampungan.	Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan perkampungan masih rendah.
		4. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat kampung.	Semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) masih rendah.
		5. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan kampung.	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di pekampungan masih rendah.
		6. Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan kampung.	Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pekampungan melalui BUMDes masih rendah.
		7. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi perkampungan.	Pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan masih rendah.
		8. Kurangnya koordinasi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan.	Sistem administrasi pemerintahan kampung khususnya administrasi pemerintahan, administrasi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi kampung/kelurahan belum optimal.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Telaahan terhadap visi misi dan program Kepala Daerah terpilih ditunjukkan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi capaian visi misi Kepala Daerah tersebut. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sejalan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2021-2026.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Provinsi dan RPJMN. Visi dan misi kepala daerah yang dimaksud

adalah visi dan misi kepala daerah yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

Visi dan misi kepala daerah tersebut merupakan cerminan dari kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stakeholders* untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Berpedoman pada arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 dengan visi: “**Way Kanan Mandiri, Maju, dan Berdaya Saing**”, dan dengan memperhatikan potensi, karakteristik, permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, maka Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan periode 2021-2026 menetapkan visi:

### **“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”**

#### **Filosofinya:**

Bahwa pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

#### **Makna Unggul:**

adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain;

**Makna Sejahtera:**

adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

**Misi-1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.**

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik.

**Misi-2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.**

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

**Misi-3: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.**

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran,



perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif.

Seiring dengan itu, perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”. Disamping itu, perlu upaya seluruh pemangku kepentingan menghadapi pandemic covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru.

**Misi-4: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.**

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang

menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka yang dipandang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah Misi 1 yaitu “Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik” dan Misi 3 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah. Adapun Tujuan Misi ke-1 adalah “Meningkatkan Kualitas Sakip Kabupaten” dengan indikator sasaran yaitu “Meningkatkan Kualitas Sakip Dinas PMK Kabupaten Way Kanan. Sedangkan Tujuan Misi ke-3 adalah “Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung” dengan indikator sasaran “Indeks Desa Membangun”.

Untuk pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 tersebut, maka selanjutnya dapat diuraikan Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD  
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PMK

<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Misi Ke-3: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah				
1. Meningkatkan Kualitas Sumberda	Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
ya Manusia		at Kampung		3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi dan program RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Way Kanan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program dan berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan tentunya terdapat faktor penghambat dan Pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas PMK dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

<b>Visi / Misi / Program Kerja KDH</b>	<b>Tupoksi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Visi: Way Kanan Unggul dan Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	1. Kapasitas SDMAparatur Pemerintah	1. Regulasi dan kemauanberusaha pada Aparatur

<b>Visi / Misi / Program Kerja KDH</b>	<b>Tupoksi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Misi Ke-3: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah	mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung; d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan	kampung dalam pembangunan. 2. Kurangnya kapasitas aparatur pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna di pekampungan. 4. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat kampung. 5. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan kampung. 6. Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan kampung. 7. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi perkampungan. 8. Kurangnya koordinasi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan.	Kampung belum merata. 2. Belum adanya struktur organisasi baru dan tupoksi yang sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Kampung dan UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Pemetaan/ indentifikasi kampung untuk penggolongan status kampung belum menyeluruh 4. Kapasitas SDM, kelembagaan, dan pendanaan 5. Klasifikasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat kampung. 6. Perspektif dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 7. Koordinasi dan Konsultasi dengan para	Pemerintah Kampung. 2. Regulasi dan Anggaran serta Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 3. Regulasi, Anggaran dan Kegiatan Profil Kampung 4. Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif 5. Regulasi dan kemauan untuk melestarikan adat dan sosial budaya masyarakat Kampung 6. Masyarakat memiliki kemauan untuk mandiri 7. TTG yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan PotensiSDA di perdesaan yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal.

<b>Visi / Misi / Program Kerja KDH</b>	<b>Tupoksi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
	e. masyarakat dan kampung; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.		pemangku kepentingan	

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian PDT dan Dinas PMD Provinsi Lampung**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PDT**

Berdasarkan Peraturan Presiden 31 No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan visi pembangunan nasional, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yaitu:

1. Sasaran Makro (Pembangunan Manusia dan Masyarakat; Ekonomi Makro);
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Kependudukan dan Keluarga Berencana; Pendidikan; Kesehatan; Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Anak; Pembangunan Masyarakat);
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Maritim dan Kelautan; Pariwisata dan Industri Manufaktur; Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas);
4. Sasaran Dimensi Pemerataan (Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi; Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu);
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah (Pemerataan Pembangunan Antarwilayah);
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Politik dan Demokrasi; Penegakan Hukum; Tata Kelola dan Reformasi

Birokrasi; Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah; Pertahanan dan Keamanan).

Sesuai Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang tercantum di dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Berikut Program yang ada pada Kementerian Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:

1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
2. Program Pembangunan Kawasan Perkampungan.
3. Program Pengembangan Daerah Tertentu.
4. Program Pembangunan Daerah Tertinggal.
5. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
6. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Sasaran pembangunan kampung dan perkampungan tahun 2015-2019 adalah: “Berkurangnya jumlah kampung tertinggal sedikitnya 5.000 kampung atau meningkatnya jumlah kampung mandiri sedikitnya 2.000 kampung”.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas PMD Provinsi Lampung**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (PMPD) Provinsi Lampung juga mengacu pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015-2019 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yaitu “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun

kemampuan IPTEK, memperkuat daya saingan perekonomian”, dimana arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dilakukan melalui:

- a. Mewujudkan Pemerintahan Kampung/Kelurahan yang demokratis dan partisipatif;
- b. Memantapkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis;
- d. Meningkatkan produktifitas dana usaha masyarakat yang didukung lembaga keuangan dan pemasaran;
- e. Mendayagunakan teknologi tepat guna dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan Peluang dan Potensi yang dimiliki, BPMPD Provinsi Lampung juga Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/Kelurahan selama 5 (lima) tahun kedepan pada periode 2015-2019, baik pada aspek Penataan dan Penguatan otonomi Kampung maupun Pemberdayaan Masyarakat, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Kampung;
2. Implementasi pembagian kewenangan antara kampung dengan kabupaten dalam hal eksploitasi pemanfaatan SDA dan pengelolaan keuangan kampung belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;
3. Kemampuan Masyarakat Kampung maupun anggota Badan Pemusyawaratan Kampung (BPD) relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya maupun pemahamannya terhadap



kewenangan Kampung itu sendiri;

4. Tingkat penghasilan perangkat kampung dan anggota Badan Pemusyawaratan Kampung (BPD) belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal;
5. Belum semua kampung memiliki kantor kampung yang ideal sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
6. Masih sedikit kampung-kampung yang mengembangkan kerjasama kampung dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi kampung. Ditambah lagi dengan minimnya infrastruktur pekampungan;
7. Ketidakberdayaan Masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;
8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal;
9. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memasyarakatkan dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas;
10. Lembaga Kampung sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal;

11. Tingginya angka kemiskinan di pekampungan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Way Kanan adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijakan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di Wilayah Kabupaten Way Kanan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang. Tujuan penilaian ruang wilayah Kabupaten Way Kanan adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Way Kanan berbasis keunggulan pertanian.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara tidak langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk mendukung semua kebijakan dan strategi penataan ruang. Terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ikut bertanggung jawab dalam penataan permukiman perkampungan dengan upaya peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan.

#### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang menargetkan menyusun sejumlah dokumen/kajian baik dokumen perencanaan maupun kajian lainnya terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan

Kampung. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 Persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional bertujuan Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang jelas diuraikan sebelumnya, maka dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam menghadapi permasalahan dan tantangan lima tahun kedepan, sehingga isu-isu yang faktual tersebut akan menentukan strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perumusan yang terjadi atau belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu Strategis berdasarkan identifikasi Permasalahan yang terkait layanan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terkait dengan Tugas dan Fungsinya adalah:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kampung untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung.
2. Jumlah kampung yang besar (221 Kampung) yang menjadi prioritas layanan program dengan tidak diimbangi kapasitas organisasi dan SDM membuat target dan capaian sering tidak sesuai rencana.

Melalui identifikasi permasalahan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan keberdayaan lembaga perkampungan dan lembaga kemasyarakatan
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan kampung dari sisi sumber daya manusia dan teknologi.
3. Peningkatan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung.
4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat kampung khususnya peran perempuan dan pemuda.
5. Peningkatan pendapatan asli kampung melalui pengembangan Lembaga ekonomi kampung khususnya BUMDES, Pasar Kampung, dan kelompok-kelompok pengelola keuangan
6. Pengembangan teknologi tepat guna.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SARAN**

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.**

Tujuan dan sasaran harus searah dengan visi dan misi serta menunjukkan secara jelas arah program. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan tidak boleh bertentangan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka yang dipandang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah Misi 1 yaitu “Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik” dan Misi 3 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah. Adapun Tujuan Misi ke-1 adalah “Meningkatkan Kualitas Sakip Kabupaten” dengan indikator sasaran yaitu “Meningkatkan Kualitas Sakip Dinas PMK Kabupaten Way Kanan. Sedangkan Tujuan Misi ke-3 adalah “Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung” dengan indikator sasaran “Indeks Desa Membangun”.

Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan maka perlu

ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Untuk itu maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMK

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
		Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMK	Nilai SAKIP Dinas PMK	Poin	64,16	65,16	66,16	67,16	68,16	69,16
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung		Indeks Desa Membangun	Poin	0,6558	0,6583	0,6608	0,6633	0,6658	0,6683
		Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Poin	3,05	3,13	3,19	3,25	3,29	3,29
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Poin	0,5517	0,5925	0,6333	0,6741	0,7149	0,7557
		Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Poin	0,7718	0,7957	0,8196	0,8435	0,8638	0,8841
		Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Poin	0,6423	0,6854	0,7285	0,7716	0,8147	0,8578

Indikator yang digunakan adalah indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri

perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan upaya OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi adalah cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Sementara itu Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam



mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan terus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa:

- ❖ Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- ❖ Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas PMK Kabupaten Way Kanan tahun 2021- 2026

Visi	: Way Kanan Unggul dan Sejahtera		
Misi Ke-1	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Misi Ke-3	: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan kualitas SAKIP OPD	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</li> <li>Peningkatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD</li> <li>Peningkatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li> <li>Melakukan Evaluasi kinerja perangkat daerah</li> </ol>
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatkan Kualitas Kampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Penataan Kampung</li> <li>Meningkatkan Kerjasama Kampung</li> <li>Meningkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan fasilitasi penataan kewenangan desa</li> <li>Peningkatan fasilitasi penamaan dan kode desa</li> <li>Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota</li> <li>Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan</li> </ol>

		<p>Tertib Administrasi Kampung</p> <p>4. Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung</p> <p>5. Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung</p> <p>6. Mengembangkan Kampung Percontohan Mengembangkan Smart Village</p>	<p>administrasi pemerintahan desa</p> <p>2. Melakukan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa</p> <p>3. Peningkatan fasilitasi penyusunan profil kampung</p> <p>4. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPK</p> <p>5. Peningkatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan</p> <p>1. Peningkatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa</p> <p>2. Peningkatan fasilitasi pengelolaan keuangan kampung</p> <p>3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa</p> <p>4. Peningkatan fasilitasi pengelolaan aset kampung</p> <p>1. Peningkatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</p>
--	--	--	---

			<p>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</p> <p>3. Peningkatan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</p> <p>4. Peningkatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa</p> <p>5. Peningkatan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna</p> <p>6. Peningkatan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat</p> <p>7. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa</p> <p>8. Peningkatan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga</p>
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga

		miskin di kampung	kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat 2. Peningkatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
--	--	-------------------	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program prioritas dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksud untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan nasional. Suatu program prioritas baik program strategis maupun program operasional, kinerjanya merupakan tanggungjawab kepala OPD. Namun program prioritas yang dikategorikan strategik menjadi tanggungjawab bersama kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Sedangkan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan wajib dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau ditelantarkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Atau definisi lain menyatakan bahwa program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dilaksanakan atau dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur.

Rencana program dilengkapi dengan indikator atau outcome program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan juga dilengkapi dengan indikator atau output kegiatan beserta target capainya dan pagu indikatif. Indikator atau outcome program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Atau definisi menyatakan bahwa kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sub kegiatan merupakan terjemahan dari aktivitas atau layanan dalam perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan bahwa:

- ❖ Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- ❖ Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
- ❖ Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
- ❖ Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
- ❖ Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.



- ❖ Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- ❖ Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :











			Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah																	
		1.6.4.9.3.1	Sub kegiatan penyediaa n jasa komunika si, sumberda ya air, dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan	12	12	63.000. 000	12	65.400. 000	12	64.800. 000	12	64.800. 000	12	64.800. 000	12	64.80 0.000		DINAS PMK
		1.6.4.9.3.2	Sub kegiatan penyediaa n jasa peralatan dan perlengka pan kantoor	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bulan	12	12	5.800.0 00	12	5.800.0 00	12	5.800.0 00	12	5.800.0 00	12	5.800.0 00	12	5.800 .000		DINAS PMK
		1.6.4.9.3.3	Sub kegiatan penyediaa n Jasa pelayanan umum kantoor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantoor	Bulan	12	12	52.970. 000	12	54.143. 000	12	54.143. 000	12	54.143. 000	12	54.143. 000	12	54.14 3.000		DINAS PMK
		1.6.4.9.4	Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah																	
		1.6.4.9.4.1	Sub kegiatan penyediaa n jasa pemelihar aan, biaya pemelihar aan dan pajak kendaraa n peroranga n dan atau	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang mendapat Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Dinas	Unit		2	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.00 0.000		DINAS PMK









		1.9.1.3.1.9	Sub kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Desa		15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000			
		1.9.1.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%		100	342.259.000	100	342.259.000	100	342.259.000	100	342.259.000	100	342.259.000	100	342.259.000	342.259.000		DINAS PMK
		1.9.1.4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
		1.9.1.4.1.1	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Terlaksananya Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Kampung	Kampung		221	74.540.300	221	74.540.300	221	74.540.300	221	74.540.300	221	74.540.300	221	74.540.300	74.540.300		DINAS PMK
		1.9.1.4.1.2	Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan kampung	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Kampung	Kampung		221	85.448.900	221	85.448.900	221	85.448.900	221	85.448.900	221	85.448.900	221	85.448.900	85.448.900		DINAS PMK
		1.9.1.4.1.3	Sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa	Terlaksananya Bimtek Manajemen BUM Desa	BUM Desa		20	99.769.800	50	99.769.800	21	99.769.800	21	99.769.800	21	99.769.800	21	99.769.800	99.769.800		DINAS PMK





			at hukum adat																		
		1.9.1.5.1.3	Sub kegiatan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat adat hukum adat	Meningkatnya Pelayanan Posyandu Lokasi Lomba terhadap Masyarakat	Kampung		221	75.750.000	221	75.750.000	221	75.750.000	221	75.750.000	221	75.750.000	221	75.750.000	75.750.000		DINAS PMK
		1.9.1.5.1.4	Sub kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Meningkatkan Pengetahuan Kader UP2K tentang Cara Peningkatan Pendapatan	Kader UP2K		221	300.000.000	221	300.000.000	221	300.000.000	221	300.000.000	221	300.000.000	221	300.000.000	300.000.000		DINAS PMK

		1.9.1.5.1.5	Sub kegiatan fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Binaan TTG serta Keikutsertaan dalam Pameran/Gelar TTG Tk. Nasional	Kelompok Binaan TTG		221	195.352.900	221	195.352.900	221	195.352.900	221	195.352.900	221	195.352.900	195.352.900		DINAS PMK
		1.9.1.5.1.6	Sub kegiatan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	Terlaksananya Peringatan dan Lomba Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kampung		221	250.000.000	221	250.000.000	221	250.000.000	221	250.000.000	221	250.000.000	250.000.000		DINAS PMK
		1.9.1.5.1.7	Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Terlaksananya TMMD dan Karya Bhakti Reguler TNI di Kab.Way Kanan	Kecamatan		15	1.116.900.000	15	1.116.900.000	15	1.116.900.000	15	1.116.900.000	15	1.116.900.000	1.116.900.000		DINAS PMK
		1.9.1.5.1.8	Sub kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya Program Kerja PKK Kab. Way Kanan	Kecamatan		15	318.799.600	15	318.799.600	15	318.799.600	15	318.799.600	15	318.799.600	318.799.600		DINAS PMK

		1.6.3.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	%		0.15	632.26 7.000	0.15	621.71 3.500	0.15	621.71 3.500	0.15	531.54 0.101	0.15	621.71 3.500	0.15	621.7 13.50 0		
		1.6.3.14.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan																DPMK
		1.6.3.14.1.1	Sub kegiatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan	Meningkatkan Pelayanan Posyandu Binaan	Kader Posyandu															



			pendayag unaan kelembag aan lembaga kemasyar akatan desa/kelu rahan (RT,RW, PKK,Posy andu,LPM, dan karang taruna) lembaga adat desa/kelu rahan dan masyarak at	terhadap Masyarakat															
		1.6.3.14.1. 2	Sub kegiatan fasilitasi pengemba ngan usaha ekonomi masyarak at dan pemerinta han desa dalam meningka tkan pendapata n asli desa	Meningkatk an Pengetahua n Kader UP2K tentang Cara Peningkatan Pendapatan	Kade r UP2K														

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang disajikan hanya yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dapat memberikan gambaran kontribusi langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Dengan demikian indikator yang lebih spesifik dan khas preangkat daerah namun tidak dimuat dalam RPJMD tidak

disajikan namun tetap menjadi bagian dari tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, karena merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK), atau Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level perangkat daerah.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mengacu pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Seperti yang telah disampaikan di depan, bahwa Berdasarkan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mengemban Visi “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” dan Misi Bupati dan Wakil Bupati pada Misi Ke-3 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah”. Secara lengkap indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas PMK yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
	Nilai SAKIP Dinas PMK	Poin	64,16	65,16	66,16	67,16	68,16	69,16
2	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6558	0,6583	0,6608	0,6633	0,6658	0,6683

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indeks Kategori Kampung	Poin	3,05	3,13	3,19	3,25	3,29	3,29
	Nilai IKE	Poin	0,5517	0,5925	0,6333	0,6741	0,7149	0,7557
	Nilai IKS	Poin	0,7718	0,7957	0,8196	0,8435	0,8638	0,8841
	Nilai IKL	Poin	0,6423	0,6854	0,7285	0,7716	0,8147	0,8578

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Berbagai perubahan yang ada terhadap konsep, kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung pada hakekatnya merupakan bentuk pengembangan strategi pembangunan untuk lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan isu-isu strategis yang ada. Dengan demikian melalui perubahan konsep dan kebijakan pembangunan masyarakat kampung/kelurahan dari periode ke periode dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan. Rencana Strategis merupakan penjabaran dari RPJMD.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ini disusun dengan memperhatikan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026. Dalam penjabaran Program dan Kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh masing-masing Bidang/Seksi dan Sekretaris/Subbag. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2021-2026, maka

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah mempunyai dokumen rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, yang dapat dijadikan pedoman dan arah untuk pelaksanaan kegiatan dengan harapan bisa menciptakan hasil guna dan daya guna sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

Renstra ini hendaknya mendapatkan dukungan penuh dari semua jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua Dinas Instansi terkait demi pencapaian Visi dan Misi.



Bupati Way Kanan,

**RADEN ADIPATI SURYA**


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN  
 NOMOR : 050/257/IV.13-WK/2022  
 TANGGAL : 16 November 2022  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN  
 TAHUN 2021-2026**

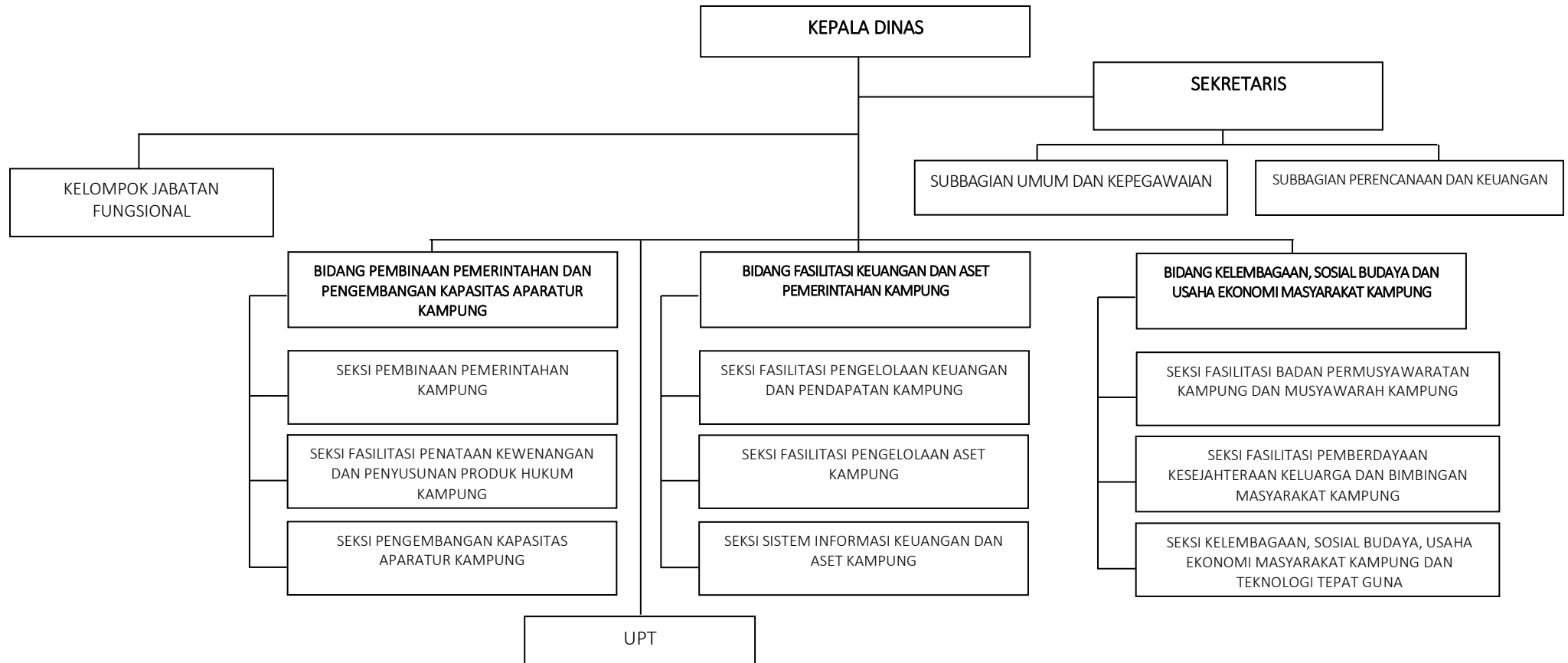
Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik.  
 Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9					
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP			Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
			Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK	Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	64,16	65,16	66,16	67,16	68,16	69,16
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun			Rilis Kemendesa	Poin	0,6558	0,6583	0,6608	0,6633	0,6658	0,6683
			Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	Poin	3,05	3,13	3,19	3,25	3,29	3,29
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Sesuai rumus IDM bagian IKE	Poin	0,5517	0,5925	0,6333	0,6741	0,7149	0,7557
			Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Sesuai rumus IDM bagian IKS	Poin	0,7718	0,7957	0,8196	0,8435	0,8638	0,8841
			Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Sesuai rumus IDM bagian IKL	Poin	0,6423	0,6854	0,7285	0,7716	0,8147	0,8578

**KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN,**

  
**IXUAN AHMADI, S.Sos., MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19751101 199503 1 001

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN



*(Sumber : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018)*



RPJMD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

KABUPATEN WAY KANAN

PERIODE 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
Misi 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik																	
1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (tujuan skpd)		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	58,64	59,64			60,64		61,64		62,64		63,64		64,64	
1.1.5 Meningkatkan Kualitas Sakip SKPD (sasaran skpd)		Nilai SAKIP OPD	Poin	50,34	52,75			55,17		57,58		60		62,5		65	
1.1.3.9 Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas PMK (strategi)		Nilai SAKIP OPD	Poin														
1.1.3.46 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Dinas PMK	Poin	64,16	65,16	5,357,880	66,16	5,893,668	67,16	6,483,035	68,16	7,131,338	69,16	7,131,338	69,16	36,868,059	DINAS PMK
1.1.3.46.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	4	5,357,880	4	5,893,668	4	6,483,035	4	7,131,338	4	7,131,338	24	36,868,059	
1.1.3.46.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1,230,000	1	1,353,000	1	1,488,300	1	1,637,130	1	1,637,130	6	8,575,560	
1.1.3.46.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1,250,600	1	1,375,660	1	1,513,226	1	1,664,549	1	1,664,549	6	8,718,583	
1.1.3.46.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	1	1	1,195,200	1	1,314,720	1	1,446,192	1	1,590,811	1	1,590,811	6	8,333,534	
1.1.3.46.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1,682,080	1	1,850,288	1	2,035,317	1	2,238,848	1	2,238,848	6	11,240,382	
1.6 Meningkatkan Kinerja Organisasi (tujuan skpd)		Nilai Komponen Kinerja Organisasi	poin	4,95	5,25			5,55		5,85		6,15		6,45		6,45	
1.6.2 Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (sasaran skpd)		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	61	62			63		64		64		65		65	
1.6.2.9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	Poin	53,77	54,77	6,160,000	55,77	6,776,000	56,77	7,453,600	57,77	8,198,960	57,77	8,198,960	18	41,642,160	
1.6.2.9.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3	3	6,160,000	3	6,776,000	3	7,453,600	3	8,198,960	3	8,198,960	18	41,642,160	
1.6.2.9.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	2,185,700	1	2,404,270	1	2,644,697	1	2,644,697	1	2,909,167	6	14,775,531	
1.6.2.9.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Laporan	1	1	1,991,000	1	2,190,100	1	2,409,110	1	2,409,110	1	2,650,021	6	13,459,341	
1.6.2.9.1.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1,983,300	1	2,181,630	1	2,399,793	1	2,399,793	1	2,639,772	6	13,407,288	
1.6.4 Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah (sasaran skpd)		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	%	100		100		100		100		100		100		100
1.6.4.9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	%	100	5,395,785,135	100	5,394,633,347	100	5,393,366,380	100	5,491,972,717	100	5,491,972,717	100	32,071,923,981	
1.6.4.9.1 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		94	94	5,047,118,135	94	5,024,139,647	94	5,060,546,580	94	5,136,080,937	94	5,136,080,937	94	29,976,289,921	
1.6.4.9.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	22	4,818,206,360	22	4,833,633,803	22	4,833,633,803	22	4,888,581,351	22	4,888,581,351	22	28,642,824,268	
1.6.4.9.1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5	91,920,000	5	91,920,000	5	91,920,000	5	101,112,000	5	101,112,000	5	559,584,000	
1.6.4.9.1.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4,544,681	1	4,497,381	1	4,544,681	1	4,544,681	1	4,544,681	1	25,742,105	
1.6.4.9.1.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	27,968,404	1	28,071,904	1	28,133,881	1	30,947,269	1	31,004,502	1	168,518,145	
1.6.4.9.1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	3,978,690	1	4,376,559	1	4,814,215	1	5,295,636	1	5,238,403	1	27,281,403	
1.6.4.9.1.6 Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	16,500,000	1	11,640,000	1	16,500,000	1	16,500,000	1	16,500,000	1	94,140,000	
1.6.4.9.1.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	84,000,000	1	50,000,000	1	81,000,000	1	89,100,000	1	89,100,000	1	458,200,000	
1.6.4.9.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	290,400,000	
1.6.4.9.2.1 Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	36	36	23,400,000	36	23,400,000	36	23,400,000	36	23,400,000	36	23,400,000	36	140,400,000	
1.6.4.9.2.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	150,000,000	
1.6.4.9.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16	16	77,000,000	16	81,500,000	16	75,000,000	16	82,500,000	16	82,500,000	16	475,500,000	
1.6.4.9.3.1 Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	12	42,000,000	12	43,000,000	12	40,000,000	12	44,000,000	12	44,000,000	12	255,000,000	
1.6.4.9.3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	35,000,000	4	38,500,000	4	35,000,000	4	38,500,000	4	38,500,000	4	220,500,000	
1.6.4.9.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36	36	133,947,000	36	147,341,700	36	124,719,800	36	130,791,780	36	130,791,780	36	789,362,060	
1.6.4.9.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	69,300,000	4	76,230,000	4	64,000,000	4	64,000,000	4	64,000,000	4	400,530,000	
1.6.4.9.4.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	6,380,000	2	7,018,000	2	7,719,800	2	8,491,780	2	8,491,780	2	43,901,360	
1.6.4.9.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	58,267,000	3	64,093,700	3	53,000,000	3	58,300,000	3	58,300,000	3	344,930,700	
1.6.4.9.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30	30	89,320,000	30	93,252,000	30	84,700,000	30	94,200,000	30	94,200,000	30	540,372,000	
1.6.4.9.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	300,000,000	

1.6.4.9.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	16	10,120,000	16	11,132,000	16	9,200,000	16	9,200,000	16	9,200,000	16	58,052,000	
1.6.4.9.5.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	29,200,000	2	32,120,000	2	25,500,000	2	35,000,000	2	35,000,000	2	182,320,000	
<b>Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia</b>																		
1.9	<b>Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung (tujuan skpd)</b>		<b>Indeks Desa Membangun</b>	<b>Poin</b>	0.6558	0.6693		0.6606		0.6633		0.6658		0.6683		0.6683		
	1.9.1	Meningkatkan Kualitas Kampung (sasaran skpd)	Indeks Kategori Kampung	Poin	3.05	3.13		319		328		329		329		329		
		3.9.1.1 Meningkatkan Penataan Kampung (strategi)					3,864,654,508	281	3,375,753,600		3,375,753,600		3,375,753,600		3,375,753,600		21,232,323,400	
		1.9.1.1 PROGRAM PENYAKSIAN DESA	Cakupan Penataan Kampung	%	10	14	100,000,000	16	100,000,000	18	100,000,000	20	100,000,000	23	100,000,000	23	600,000,000	DINAS PMK
		1.9.1.1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Peningkatan Kualitas Kampung	%														
		1.9.1.1.1.1 Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya	Desa	6	221	55,000,000	221	55,000,000	221	55,000,000	221	55,000,000	221	55,000,000	221	330,000,000	DINAS PMK
		1.9.1.1.1.2 Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	0	221	45,000,000	221	45,000,000	221	45,000,000	221	45,000,000	221	45,000,000	221	270,000,000	DINAS PMK
		3.9.1.2 Meningkatkan Kerjasama Kampung (strategi)																
		1.9.1.2 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	%	7	10	200,403,600	14	200,403,600	21	200,403,600	23	200,403,600	25	200,403,600	25	1,202,421,600	DINAS PMK
		1.9.1.2.1 Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa															
		1.9.1.2.1.1 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	200,403,600	4	1,202,421,600	DINAS PMK
		3.9.1.3 Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung (strategi skpd)																
		1.9.1.3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	%	100	100	809,843,400	100	320,942,500	100	320,942,500	100	320,942,500	100	320,942,500	100	2,903,456,800	DINAS PMK
		1.9.1.3.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.9.1.3.1.1 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	221	221	83,736,000	221	43,736,000	221	43,736,000	221	43,736,000	221	43,736,000	221	342,416,000	DINAS PMK
		1.9.1.3.1.2 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	85	118	320,900,900	0	-	0	-	0	-	0	-	0	641,801,800	DINAS PMK
		1.9.1.3.1.3 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	221	221	85,704,000	221	50,704,000	221	50,704,000	221	50,704,000	221	50,704,000	221	374,224,000	DINAS PMK
		1.9.1.3.1.4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	221	221	45,579,600	221	35,579,600	221	35,579,600	221	35,579,600	221	35,579,600	221	233,477,600	DINAS PMK
		1.9.1.3.1.5 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	93,922,900	1	65,922,900	1	65,922,900	1	65,922,900	1	65,922,900	1	451,537,400	DINAS PMK
		1.9.1.3.1.6 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	221	221	55,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	250,000,000	DINAS PMK
		1.9.1.3.1.7 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	221	221	65,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	35,000,000	221	270,000,000	DINAS PMK
		1.9.1.3.1.8 Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	221	221	35,000,000	221	30,000,000	221	30,000,000	221	30,000,000	221	30,000,000	221	190,000,000	DINAS PMK
		1.9.1.3.1.9 Fasilitas Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Desa	221	221	25,000,000	221	25,000,000	221	25,000,000	221	25,000,000	221	25,000,000	221	150,000,000	DINAS PMK
		3.9.1.4 Meningkatkan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung (strategi skpd)																
		1.9.1.4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%	100	100	342,259,000	100	342,259,000	100	342,259,000	100	342,259,000	100	342,259,000	100	2,053,554,000	DINAS PMK
		1.9.1.4.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa															
		1.9.1.4.1.1 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	221	221	74,540,300	221	74,540,300	221	74,540,300	221	74,540,300	221	74,540,300	221	447,241,800	DINAS PMK
		1.9.1.4.1.2 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	221	221	85,448,900	221	85,448,900	221	85,448,900	221	85,448,900	221	85,448,900	221	512,693,400	DINAS PMK
		1.9.1.4.1.3 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	20	20	99,769,800	50	99,769,800	21	99,769,800	21	99,769,800	21	99,769,800	21	598,618,800	DINAS PMK
		1.9.1.4.1.4 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	221	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	82,500,000	221	495,000,000	DINAS PMK
		3.9.1.5 Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat Kampung (strategi skpd)																
		3.9.1.6 Mengembangkan Kampung Percontohan (strategi skpd)																
		3.9.1.7 Mengembangkan Smart Village (strategi skpd)																
		1.9.1.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat Kampung	%	43	43	2,412,148,500	51	2,412,148,500	55	2,412,148,500	60	2,412,148,500	66	2,412,148,500	66	14,472,891,000	DINAS PMK
		1.9.1.5.1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat/Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitas Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat															
		1.9.1.5.1.1 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	4	4	65,346,000	4	65,346,000	4	65,346,000	4	65,346,000	4	65,346,000	4	392,076,000	DINAS PMK
		1.9.1.5.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	540,000,000	DINAS PMK
		1.9.1.5.1.3 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	27	27	75,750,000	27	75,750,000	27	75,750,000	27	75,750,000	27	75,750,000	27	454,500,000	DINAS PMK
		1.9.1.5.1.4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Dokumen	1	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	1,800,000,000	DINAS PMK

	1.9.1.5.1.5	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	195,352,900	1	195,352,900	1	195,352,900	1	195,352,900	1	195,352,900	1	1,172,117,400	DINAS PMK
	1.9.1.5.1.6	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	3	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	1,500,000,000	DINAS PMK
	1.9.1.5.1.7	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	1,116,900,000	1	1,116,900,000	1	1,116,900,000	1	1,116,900,000	1	1,116,900,000	1	5,701,400,000	DINAS PMK
	1.9.1.5.1.8	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	318,799,600	1	318,799,600	1	318,799,600	1	318,799,600	1	318,799,600	1	1,912,797,600	DINAS PMK
	1.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan (tujuan skpd)	Angka Kemiskinan	%	12.75	12.35		11.9	11.4		10.7		9.99		9.99			
	1.6.3	Pemberdayaan Masyarakat Miskin (sasaran skpd)	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	%		2.08		2.08	2.08		2.08		2.08		2.08			
	3.6.3.14	Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung (strategi)																
	1.6.3.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	%	0.15	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	531,540,101	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	3,650,661,101	DINAS PMK
	1.6.3.14.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Peikutnya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat															
	1.6.3.14.1	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	4	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	1,200,000,000	DINAS PMK
	1.6.3.14.1	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Dokumen	1	1	421,713,500	1	421,713,500	1	331,540,101	1	421,713,500	1	421,713,500	1	2,450,661,101	DINAS PMK
	1.6.4	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak (sasaran skpd)	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Sinergi dengan Berbagai Pihak	%	0	0.30	621,713,500	0.30	621,713,500	0.30	531,540,000	0.30	621,713,500	0.30	621,713,500	0.30	3,650,661,000	
	3.6.4	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan terutama persentil 1-13 dengan Pemerintahan Kampung (strategi)																
	3.6.4.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang diberdayakan Melalui Dana Desa	%	0	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	531,540,000	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	3,650,661,000	DINAS PMK



Tabel T.C. 27  
 Reviu Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PMK  
 KABUPATEN WAY KANAN  
 Tahun 2021-2026

MISI 1 DAN 3

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Pemanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2021 Tahun-1		Tahun 2022 Tahun-2		Tahun 2023 Tahun-3		Tahun 2024 Tahun-4		Tahun 2025 Tahun-5		Tahun 2026 Tahun-6					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah				Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	57,64 Poin	58,64 Poin	59,64 Poin	60,64 Poin	61,64 Poin	62,64 Poin	63,64 Poin	64,64 Poin	65,64 Poin	66,64 Poin	67,64 Poin	68,64 Poin	69,64 Poin	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.1.5. Meningkatkan Kualitas Sakip SKPD			Nilai SAKIP OPD	47,92 Poin	50,34 Poin	52,75 Poin	55,17 Poin	57,58 Poin	60 Poin	62,5 Poin	65 Poin	67,5 Poin	70 Poin	72,5 Poin	75 Poin	77,5 Poin	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.1.3.46		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas PMK	63,16 Poin	64,16 Poin	4,870,800	65,16 Poin	5,357,880	66,16 Poin	5,893,668	67,16 Poin	6,483,035	68,16 Poin	7,131,338	69,16 Poin	7,131,338	69,16 Poin	36,868,059	DINAS PMK	Way Kanan
	1.1.3.46.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,870,800	4	5,357,880	4	5,893,668	4	6,483,035	4	7,131,338	4	7,131,338	24	36,868,059	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.1.3.46.1	1	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD dan dokumen evaluasi Renja SKPD	2 Dokumen	1,230,000	1 Dokumen	1,230,000	1 Dokumen	1,353,000	1 Dokumen	1,488,300	1 Dokumen	1,637,130	1 Dokumen	1,637,130	4 Dokumen	2,460,000	Way Kanan	Way Kanan	
	1.1.3.46.1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	1,250,000	1 Dokumen	1,250,600	1 Dokumen	1,375,660	1 Dokumen	1,513,226	1 Dokumen	1,664,549	1 Dokumen	1,664,549	4 Dokumen	6,217,983	Way Kanan	Way Kanan	
	1.1.3.46.1	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan tahisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1,195,000	1 Laporan	1,195,200	1 Laporan	1,314,720	1 Laporan	1,446,192	1 Laporan	1,590,811	1 Laporan	1,590,811	4 Laporan	2,391,000 dan 1 Dokumen	Way Kanan	Way Kanan	
	1.1.3.46.1	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan tahisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1,195,000	1 Laporan	1,682,080	1 Laporan	1,850,288	1 Laporan	2,035,317	1 Laporan	2,238,848	1 Laporan	2,238,848	4 Laporan	2,877,080 dan 1 Dokumen	Way Kanan	Way Kanan	
1.6. Meningkatkan Kinerja Organisasi	1.6.2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara			Nilai Komponen Kinerja Organisasi	464 Poin	435 Poin	425 Poin	433 Poin	435 Poin	445 Poin	455 Poin	465 Poin	475 Poin	485 Poin	495 Poin	505 Poin	515 Poin	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.6.2.9		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	51,77 Poin	53,77 Poin	5,600,000	54,77	6,160,000	55,77	6,776,000	56,77	7,453,600	57,77	7,453,600	57,77	8,198,960	57,77	41,642,160	DINAS PMK	Way Kanan
	1.6.2.9.1		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	5,600,000	3	6,160,000	3	6,776,000	3	7,453,600	3	7,453,600	3	8,198,960	18	41,642,160	DINAS PMK	Way Kanan	
	1.6.2.9.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1,987,000	1 Laporan	2,185,700	1 Laporan	2,404,270	1 Laporan	2,644,697	1 Laporan	2,644,697	1 Laporan	2,909,167	4 Laporan	4,172,700 dan 1 Dokumen	Way Kanan	Way Kanan	
	1.6.2.9.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester	2 Dokumen	1,810,000	1 Laporan	1,991,000	1 Laporan	2,190,100	1 Laporan	2,409,310	1 Laporan	2,409,310	1 Laporan	2,650,021	4 Laporan	3,801,000 dan 2 Dokumen	Way Kanan	Way Kanan	
	1.6.2.9.1.5		Berprestasi dan Inovatif	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	1 Dokumen	1,803,000	1 Dokumen	1,983,300	1 Dokumen	2,181,630	1 Dokumen	2,399,793	1 Dokumen	2,399,793	1 Dokumen	2,639,772	2 Dokumen	3,786,300 dan 1 Dokumen	Way Kanan	Way Kanan	
	1.6.4		Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PMK	Way Kanan	
	1.6.4.9		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	4,791,193,685	100	5,395,785,138	100	5,395,785,138	100	5,314,866,380	100	5,398,672,717	100	5,398,672,717	100	31,710,610,281	DINAS PMK	Way Kanan
	1.6.4.9.1		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	100	4,791,193,685	0	5,047,118,138	0	5,024,139,647	0	5,060,546,580	0	5,136,080,937	0	5,136,080,937	0	29,976,289,921	DINAS PMK	Way Kanan
	1.6.4.9.1.1		Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 Bulan	4,380,187,600	22 Orang/Bulan	4,818,206,360	22 Orang/Bulan	4,833,633,803	22 Orang/Bulan	4,833,633,803	22 Orang/Bulan	4,888,581,351	22 Orang/Bulan	4,888,581,351	12 bulan/22	9,198,393,960	Way Kanan	Way Kanan	
	1.6.4.9.1.2		Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	81,600,000	3 Dokumen	91,920,000	3 Dokumen	91,820,000	3 Dokumen	91,920,000	3 Dokumen	101,112,000	3 Dokumen	101,112,000	12 bulan/3 dokumen	173,520,000 dan 1 Dokumen	Way Kanan	Way Kanan	
	1.6.4.9.1.3		Persediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan	3,066,000	1 Paket	4,544,681	1 Paket	4,497,381	1 Paket	4,544,681	1 Paket	4,544,681	1 Paket	4,544,681	12 bulan/1 paket	7,610,681	Way Kanan	Way Kanan	
	1.6.4.9.1.4		Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan	22,392,185	1 Paket	27,968,404	1 Paket	27,968,404	1 Paket	27,968,404	1 Paket	27,968,404	1 Paket	27,968,404	12 bulan/1 paket	50,360,589	Way Kanan	Way Kanan	

										1 Paket	28,071,904	1 Paket	28,133,881	1 Paket	30,947,269	1 Paket	31,004,502	4 paket	118,137,556	
1.6.4.9.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	3,577,900	1 Paket	3,978,690				1 Paket	4,376,559	1 Paket	4,814,215	1 Paket	5,295,636	1 Paket	5,238,403	12 bulan/1 paket	7,556,590	Way Kanan
1.6.4.9.1.6	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan untuk penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	16,500,000	1 Laporan	16,500,000				1 Laporan	11,640,000	1 Laporan	16,500,000	1 Laporan	16,500,000	1 Laporan	16,500,000	12 bulan/1 laporan	33,000,000	Way Kanan
1.6.4.9.1.7	Berkoordinasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	65,000,000	2 Laporan	84,000,000				2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	81,000,000	2 Laporan	89,100,000	2 Laporan	89,100,000	12 Laporan/2 laporan	149,000,000	Way Kanan
1.6.4.9.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan SKPD		48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	48,400,000	41	0	290,400,000	
1.6.4.9.2.1	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakain dinas beserta atribut kelengkapannya	36 Paket	23,400,000	36 Paket	23,400,000				36 Paket	23,400,000	36 Paket	23,400,000	36 Paket	23,400,000	36 Paket	23,400,000	72 Paket	46,800,000	Way Kanan
1.6.4.9.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Unit Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000				5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000	10 Orang	50,000,000	Way Kanan
1.6.4.9.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16	77,000,000	16	77,000,000	16	81,500,000	16	75,000,000	16	82,500,000	16	82,500,000	16	82,500,000	16	16	475,500,000	
1.6.4.9.3.1	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	12 Unit	42,000,000	12 Unit	42,000,000				12 Unit	43,000,000	12 Unit	40,000,000	12 Unit	44,000,000	12 Unit	44,000,000	24 Unit	84,000,000	Way Kanan
1.6.4.9.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	35,000,000	4 Unit	35,000,000				4 Unit	38,500,000	4 Unit	35,000,000	4 Unit	38,500,000	4 Unit	38,500,000	8 Unit	70,000,000	Way Kanan
1.6.4.9.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		58,770,000	0	133,947,000	0	83,248,000	0	71,719,800	0	72,491,780	0	72,491,780	0	72,491,780	0	0	555,668,360	
1.6.4.9.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	63,000,000	3 Laporan	69,300,000				3 Laporan	76,230,000	3 Laporan	64,000,000	3 Laporan	64,000,000	3 Laporan	64,000,000	12 bñ dan 3 Laporan	152,300,000	Way Kanan
1.6.4.9.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	5,800,000	2 Laporan	6,380,000				2 Laporan	7,018,000	2 Laporan	7,719,800	2 Laporan	8,491,780	2 Laporan	8,491,780	12 bñ dan 2 Laporan	12,180,000	Way Kanan
1.6.4.9.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	52,970,000	4 Laporan	58,267,000				4 Laporan	64,093,700	4 Laporan	53,000,000	4 Laporan	58,300,000	4 Laporan	58,300,000	12 bulan dan 4 laporan	111,237,000	Way Kanan
1.6.4.9.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		34,700,000	0	89,320,000	0	61,132,000	0	59,200,000	0	59,200,000	0	59,200,000	0	59,200,000	0	112	362,752,000	
1.6.4.9.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan roda empat yang mendapat biaya pemeliharaan	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000				2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	4	100,000,000	Way Kanan
1.6.4.9.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jalanan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	16 Unit	9,200,000	16 Unit	10,120,000				16 Unit	11,132,000	16 Unit	9,200,000	16 Unit	9,200,000	16 Unit	9,200,000	32	19,320,000	Way Kanan
1.6.4.9.5.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	25,500,000	2 Unit	29,200,000				2 Unit	32,120,000	2 Unit	25,500,000	2 Unit	35,000,000	2 Unit	35,000,000	4	54,700,000	Way Kanan
1.9. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Kampung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / direhabilitasi	0, 6541 Poin	0, 6588 Poin	0, 6583	0, 6608	0, 6633	0, 6658	0, 6683	0, 6658	0, 6683	0, 6658	0, 6683	0, 6658	0, 6683	0, 6658	0, 6683			
1.9.1. Meningkatkan Kualitas Kampung		Indeks Desa Membangun	3,00 Poin	3,05 Poin	3,13 Poin	3,819,654,800	3,19 Poin	2,904,454,000	3,25 Poin	2,904,454,000	3,29 Poin	2,904,454,000	3,29 Poin	2,904,454,000	3,29 Poin	2,904,454,000	3,29 Poin	19,302,125,000		
1.9.1.1. PROGRAM PENATAAN DESA		Indeks Kategori Kampung	%	10	55,000,000	14	55,000,000	16	55,000,000	18	55,000,000	20	55,000,000	23	55,000,000	23	55,000,000		375,000,000	DINAS PMK
1.9.1.1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		Cakupan Penataan Kampung	%	10	55,000,000	14	55,000,000	16	55,000,000	18	55,000,000	20	55,000,000	23	55,000,000	23	55,000,000		375,000,000	DINAS PMK
1.9.1.1.1.1. Fasilitas Penataan Kewenangan Desa		Peningkatan Kualitas Kampung																		
1.9.1.1.1.2. Fasilitas Penamaan dan Kode Desa		Jumlah Desa yang Tersnilitasi Penataan Kewengannya	221 Desa	30,000,000	221 Desa	30,000,000				221 Desa	30,000,000	221 Desa	30,000,000	221 Desa	30,000,000	221 Desa	30,000,000	442	60,000,000	DINAS PMK
1.9.1.1.2. PROGRAM Peningkatan Kerjasama Desa		Jumlah Desa yang Tersnilitasi Penamaan dan Kode Desa	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000				221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	663	120,000,000	DINAS PMK
1.9.1.2.1. Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa		Jumlah Desa yang Tersnilitasi Penamaan dan Kode Desa	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000				221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000	1326	150,000,000	DINAS PMK
1.9.1.2.1.1. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600				4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	8	400,807,200	DINAS PMK
1.9.1.3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600				4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	4 Dokumen	200,403,600	16	801,614,400	Way Kanan
		Cakupan Terbit Administrasi Kampung	%	100	726,107,400	100	809,843,400	100	295,942,500	100	295,942,500	100	295,942,500	100	295,942,500	100	295,942,500	100	2,803,456,800	DINAS PMK

1.9.1.3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																			
1.9.1.3.1.1	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Jumlah sekretaris kampung yang terlatih	221 Kampung	83,736,000	221 Dokumen	83,736,000												442	167,492,000	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.3.1.2	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan kepala desa tahun 2021	85 Kampung	320,900,900	118 Laporan	320,900,900												203	641,801,800	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.3.1.3	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kampung yang mendapat fasilitas penyusunan profil	221 Kampung	85,704,000	221 Dokumen	85,704,000												442 Dokumen	171,408,000	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.3.1.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BDK	Jumlah kampung yang mendapat pembinaan BDK	221 Kampung	45,579,600	221 Orang	45,579,600												442	91,159,200	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.3.1.5	Facilitasi Perencanaan Pembangunan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah kampung yang mengikuti pembinaan	14 Kecamatan	93,922,900	1 Dokumen	93,922,900												14 laporan dan 1 dokumen	187,845,800	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.3.1.6	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu	221 Dokumen	55,000,000	221 Dokumen	55,000,000												442 Dokumen	110,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.3.1.7	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas aparaturnya	221 Orang	65,000,000	221 Orang	65,000,000												884 dokumen	140,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.3.1.8	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	221 Laporan	35,000,000	221 Laporan	35,000,000												442 Laporan	70,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.3.1.9	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa	221 Desa	25,000,000	221 Desa	25,000,000												442 DESA	50,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Kampung Terbina Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%	100	267,718,700	100	342,289,000	100	289,759,000	100	289,759,000	100	289,759,000	100	289,759,000	100	289,759,000	100	1,723,554,000	DINAS PMK	
1.9.1.4.1	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya penitihan aplikasi sistem informasi keuangan	221 Kampung	74,540,300	221 Dokumen	74,540,300												442 Dokumen	149,080,600	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.4.2	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pengelolaan keuangan kampung	221 Kampung	85,448,900	221 Dokumen	85,448,900												442 Dokumen	170,897,800	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.4.3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah peserta bimtek manajemen BUMDesa	20 BUM Desa	99,769,800	20 Dokumen	99,769,800												884 dokumen	341,795,600	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.4.4	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta pelatihan struktur lembaga dalam bidang pengelolaan Aset Desa	221 Kampung	82,500,000	221 Dokumen	82,500,000												442 Dokumen	165,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	%	43	2,412,148,500	43	2,412,148,500	51	2,093,348,900	55	2,093,348,900	60	2,093,348,900	66	2,093,348,900	66	2,093,348,900	66	13,197,692,600	DINAS PMK	
1.9.1.5.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat/tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat																			
1.9.1.5.1.1	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah kelembagaan LPM yang dibina	4 Dokumen	65,346,000	4 Dokumen	65,346,000												8 Dokumen	130,692,000	DINAS PMK	Way Kanan
1.9.1.5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	3 poskades	90,000,000	1 Lembaga	90,000,000												4 Lembaga	180,000,000	DINAS PMK	Way Kanan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang			1 Lembaga	90,000,000			1 Lembaga	90,000,000	1 Lembaga	90,000,000	1 Lembaga	90,000,000	1 Lembaga	90,000,000	1 Lembaga	4 Lembaga	360,000,000	DINAS PMK	

	1.9.1.5.1.3	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.		27 Unit	75,750,000	27 Unit	75,750,000	27 Unit	75,750,000	27 Unit	75,750,000	27 Unit	75,750,000	162 Unit	454,500,000	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.9.1.5.1.4	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	1 Dokumen		300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	6 Dokumen	1,800,000,000	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.9.1.5.1.5	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	221 kelompok binaan TIG		195,352,900	1 Laporan	195,352,900							221 Kelompok binaan TIG dan 1 Laporan	390,705,800	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.9.1.5.1.6	Facilitasi Bulas Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					1 Laporan	195,352,900	1 Laporan	195,352,900	1 Laporan	195,352,900	1 Laporan	195,352,900	4 Laporan	781,411,600			
	1.9.1.5.1.6	Facilitasi Bulas Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam		3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	250,000,000							6 Laporan	500,000,000	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.9.1.5.1.7	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenraman, Keterlibatan dan Perindugunan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Bulas Bhakti Gotong Royong. Pelaksanaan karya bhakti dan TMMD reguler di Kabupaten	1 Kecamatan		1,116,900,000									12 laporan	1,000,000,000	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.9.1.5.1.8	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketenraman, Keterlibatan dan Perindugunan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1,116,900,000	1 Dokumen	1,116,900,000	1 Dokumen	1,116,900,000	1 Dokumen	1,116,900,000	1 Dokumen	1,116,900,000	5 dokumen	5,584,500,000	DINAS PMK	Way Kanan
	1.9.1.5.1.8	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Terlaksananya program kerja PKK Kab. Way Kanan	1 tahun		318,799,600	1 Dokumen	318,799,600							1 th dan 1 Dokumen	637,599,200	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.6. Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan				1 Dokumen	318,799,600	1 Dokumen	318,799,600	1 Dokumen	318,799,600	1 Dokumen	318,799,600	4 dokumen	1,275,198,400	DINAS PMK	Way Kanan		
	1.6.3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin																			
	1.6.3.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Lampung Yang Diberdayakan	%		0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	531,540,101	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	3,650,661,101	DINAS PMK	Way Kanan	
	1.6.3.14.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Facilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat																	
	1.6.3.14.1.1	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah kelembagaan LPM yang ada	4 Dokumen			200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	16	800,000,000	DINAS PMK	Way Kanan	
	1.6.3.14.1.2	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	4 Dokumen				4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	16	800,000,000			
	1.6.3.14.1.2	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang terdapat jumlah PISAS yang terdapat	1 Dokumen			421,713,500	1	421,713,500	1	331,540,101	1	421,713,500	1	421,713,500	4	1,596,680,601	DINAS PMK	Way Kanan	
	1.6.4. Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak		Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen			421,713,500	1	421,713,500	1	331,540,101	1	421,713,500	1	421,713,500	4	1,596,680,601			
	3.6.4.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana Desa	%		0.30	621,713,500	0.30	621,713,500	0.30	531,540,000	0.30	621,713,500	0.30	621,713,500	0.30	3,650,661,000	DINAS PMK	Way Kanan	
	3.6.4.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana Desa	%		0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	531,540,000	0.15	621,713,500	0.15	621,713,500	0.15	3,650,661,000	DINAS PMK	Way Kanan	



Tabel T.C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (WAY KANAN UNGGUL DAN SEJAHTERA)			
MISI I : (MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah	1.1.5. Meningkatkan kualitas saking SKPD	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			2. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
			3. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			4. Melakukan Evaluasi kinerja perangkat daerah
1.6. Meningkatnya kinerja organisasi	1.6.2. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1. Melakukan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
			2. Melakukan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
			3. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
			4. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
			5. Melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
			6. Melakukan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
			7. Melakukan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.6.4. Menyelenggarakan administrasi umum perangkat daerah	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1. Melakukan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			2. Melakukan penyediaan bahan logistik kantor
			3. Melakukan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			4. Melakukan fasilitasi kunjungan tamu
			5. Melakukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			6. Melakukan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
			7. Melakukan pengadaan mebel
			8. Melakukan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
			9. Melakukan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
			10. Melakukan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
			11. Melakukan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
			12. Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
			13. Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

MISI III : (MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat kampung	1.9.1. Meningkatkan kualitas kampung	3.9.1.1. Meningkatkan penataan kampung	1. Melakukan fasilitasi penataan kewenangan desa 2. Melakukan fasilitasi penamaan dan kode desa
		3.9.1.2. Meningkatkan kerjasama kampung	1. Melakukan fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota
		3.9.1.3. Meningkatkan tertib administrasi kampung	1. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
			2. Melakukan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
			3. Melakukan fasilitasi penyusunan profil desa
			4. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
			5. Melakukan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
			6. Melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum desa
			7. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
			8. Melakukan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
			9. Melakukan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
		3.9.1.4. Meningkatkan tertib administrasi keuangan kampung dan aset kampung	1. Melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
			2. Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
			3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa
			4. Melakukan fasilitasi pengelolaan aset desa
		3.9.1.5. Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan kampung	1. Melakukan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
		3.9.1.6. Mengembangkan kampung percontohan	2. Melakukan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
3.9.1.7. Mengembangkan smart village	3. Melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat		
	4. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa		
	5. Melakukan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna		

			6. Melakukan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat
			7. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
			8. Melakukan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
1.6. Menurunnya tingkat kemiskinan	1.6.3. Pemberdayaan masyarakat miskin	3.6.3.14. Pemberdayaan masyarakat miskin di kampung	1. Melakukan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
			2. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa

Tabel T.C.25  
Reviu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	1.1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai evaluasi sakip kabupaten	58.64	59.64	60.64	61.64	62.64
		1.1.5. Meningkatkan kualitas sakip skpd	Nilai sakip skpd	50.34	52.75	55.17	57.58	60
2	1.6. Meningkatnya kinerja organisasi		Nilai komponen kinerja organisasi	4.95	5.25	5.55	5.85	6.15
		1.6.2. Meningkatkan kualitas aparatur sipil daerah (ASPD)	Indeks profesionalitas ASN Dinas PMK	60	61	62	63	64
		1.6.4. Menyelenggarakan administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100
3	1.9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat kampung		Indeks Desa Membangun	0.6591	0.6641	0.6721	0.6809	0.6872
		1.9.1. Meningkatkan kualitas kampung	Indeks Kategori Kampung	3.05	3.13	3.19	3.25	3.29
4	1.6. Menurunnya tingkat kemiskinan		Angka kemiskinan	12.75	12.35	11.9	11.4	10.7
		1.6.3. Pemberdayaan masyarakat miskin	Cakupan pemberdayaan masyarakat miskin	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08

**Tabel. T.C. 24**  
**Reviu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**  
**Kabupaten Way Kanan**  
**Periode 2016-2021**

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
I	BELANJA DAERAH	6,738,878,682	9,068,331,608	6,705,863,435	6,348,836,387	3,928,350,285	5,863,426,850	8,347,723,202	6,258,458,590	5,901,243,413	3,649,908,583	87.01%	92.05%	93.33%	92.95%	92.91%	6,558,052,079	6,004,152,128
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,948,125,722	2,214,901,108	2,143,736,735	2,185,894,687	2,242,962,900	1,912,065,830	2,096,625,952	2,004,940,843	2,041,777,022	2,112,568,386	98.15%	94.66%	93.53%	93.41%	94.19%	2,147,124,230	2,033,595,607
III	BELANJA LANGSUNG	4,790,752,960	6,853,430,500	4,562,126,700	4,162,941,700	1,685,387,385	3,951,361,020	6,251,097,250	4,253,517,747	3,859,466,391	1,537,340,197	82.48%	91.21%	93.24%	92.71%	91.22%	4,410,927,849	3,970,556,521
	- BELANJA PEGAWAI	35,150,000	34,800,000	49,320,000	55,920,000	392,850,000	35,150,000	43,170,000	49,320,000	55,920,000	392,850,000							
	- BELANJA BARANG DAN JASA	4,360,302,960	6,811,630,500	4,448,056,700	4,041,618,800	1,292,537,385	3,536,915,020	6,202,302,250	4,141,979,747	3,738,320,591	1,144,490,197							
	- BELANJA MODAL	395,300,000	7,000,000	64,750,000	65,402,900	-	379,296,000	5,625,000	62,218,000	65,225,800	-							

Tabel. T.C. 23  
 Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung  
 Tahun 2016-2021  
 Kabupaten Way Kanan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
1	Persentase Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	55,00	9,05	6,79	4,52	-	-	52,48	38,01	9,50	8,60	-	-	52,48	38,01	9,50	8,60

Tabel T-B.35.

Reviu Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Nilai IDM Kabupaten Way Kanan masih rendah.	1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat kampung dalam pembangunan	Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
2	Masih terdapat 9,50% Kampung Tertinggal.	2. Kurangnya kapasitas aparat pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Sistem pendataan profil kampung / kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di kampung / kelurahan belum optimal.
3	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat rendah. Hal ini mengindikasikan lunturnya nilai-nilai kegotongroyongan, sehingga potensial menimbulkan permasalahan lebih lanjut dalam menghadapi tuntutan desa mandiri.	3. Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna di pekampungan.	Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan perdesaan masih rendah
		4. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat kampung.	Semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) masih rendah.
		5. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan kampung.	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di pekampungan masih rendah.
		6. Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan kampung.	Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes masih rendah.
		7. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi perkampungan.	Pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan masih rendah.
		8. Kurangnya koordinasi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan.	Sistem administrasi pemerintahan kampung khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi kampung / kelurahan belum optimal.

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran

Kolom (3) diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi

Kolom (4) diisi dengan rumusan akar masalah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum